

**PERAN KEPEMIMPINAN DIGITAL DALAM PEMANFAATAN  
APLIKASI SRIKANDI SEBAGAI BAGIAN DARI IMPLEMENTASI  
*E- GOVERNMENT*  
(Studi di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Lampung).**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**ANGELINA OKTAVIANA  
NPM 2216021044**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

## **ABSTRAK**

### **PERAN KEPEMIMPINAN DIGITAL DALAM PEMANFAATAN APLIKASI SRIKANDI SEBAGAI BAGIAN DARI IMPLEMENTASI *E- GOVERNMENT***

**(Studi di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Lampung)**

**Oleh**

**ANGELINA OKTAVIANA**

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mewajibkan instansi pemerintah menerapkan sistem administrasi berbasis digital, termasuk melalui aplikasi SRIKANDI. Namun, implementasinya di BPSDM Provinsi Lampung belum optimal karena masih terdapat kombinasi sistem manual dan digital dalam pengelolaan persuratan. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran kepemimpinan digital dalam pemanfaatan aplikasi SRIKANDI. Penelitian ini menggunakan teori digital leadership oleh George Westerman yang meliputi digital vision, digital competence, digital transformation management, dan employee engagement, dengan metode deskriptif kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan telah mendorong pemanfaatan aplikasi SRIKANDI melalui kebijakan formal dan pendampingan teknis. Digital vision sudah berjalan karena pimpinan telah memasukkan agenda digitalisasi ke dalam Renstra serta mendukung implementasi SRIKANDI melalui kebijakan dan arahan organisasi. Digital transformation management juga telah berjalan melalui pengaturan sistem kerja berupa penunjukan pengelola aplikasi, serta pelaksanaan pendampingan teknis. Namun, digital competence belum optimal karena keterbatasan kemampuan teknis pegawai, dan employee engagement masih rendah akibat kurangnya keterlibatan pegawai. Dengan demikian, pemimpin digital dalam pemanfaatan aplikasi SRIKANDI di BPSDM Provinsi Lampung sudah berjalan, namun belum optimal. .

**Kata Kunci:** Peran Kepemimpinan Digital, Pemanfaatan SRIKANDI, SPBE, *E-Government*, BPSDM Provinsi Lampung.

## **ABSTRACT**

### ***THE ROLE OF DIGITAL LEADERSHIP IN UTILIZING THE SRIKANDI APPLICATION AS PART OF E-GOVERNMENT IMPLEMENTATION (Study at the Lampung Province Human Resources Development Agency)***

**By**

**ANGELINA OKTAVIANA**

*Presidential Regulation Number 95 of 2018 concerning the Electronic-Based Government System (SPBE) requires government institutions to implement digital-based administrative systems, including through the SRIKANDI application. However, its implementation at the Human Resource Development Agency (BPSDM) of Lampung Province has not been optimal, as there is still a combination of manual and digital systems in managing correspondence. This study aims to analyze the role of digital leadership in the utilization of the SRIKANDI application. This research employs the digital leadership theory proposed by George Westerman, which includes digital vision, digital competence, digital transformation management, and employee engagement, using a descriptive qualitative method through interviews, observations, and documentation. The results show that leadership has encouraged the use of the SRIKANDI application through formal policies and technical assistance. Digital vision has been implemented, as leaders have incorporated digitalization into the strategic plan and supported the implementation of SRIKANDI through organizational policies and directives. Digital transformation management has also been implemented through the structuring of work systems, including the appointment of application administrators, and the provision of technical assistance. However, digital competence remains suboptimal due to limited technical capabilities of employees, and employee engagement is still low due to the lack of employee involvement. Therefore, digital leadership in the utilization of the SRIKANDI application at BPSDM Lampung Province can be considered to have been implemented, but not yet optimal.*

*Keywords: Role of Digital Leadership, SRIKANDI Utilization, SPBE, E-Government, Human Resource Development Agency of Lampung Province.*

**PERAN KEPEMIMPINAN DIGITAL DALAM PEMANFAATAN  
APLIKASI SRIKANDI SEBAGAI BAGIAN DARI IMPLEMENTASI  
*E- GOVERNMENT*  
(Studi di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Lampung)**

**Oleh**

**ANGELINA OKTAVIANA**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

**Pada**

**Jurusan Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

Judul Skripsi

: **PERAN KEPEMIMPINAN DIGITAL  
DALAM PEMANFAATAN APLIKASI  
SRIKANDI SEBAGAI BAGIAN DARI  
IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT  
(Studi di BPSDMD Provinsi Lampung)**

Nama Mahasiswa

: **Angelina Oktaviana**

Nomor Pokok Mahasiswa

: **2216021044**

Program Studi

: **S-1 Ilmu Pemerintahan**

Jurusan


: **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas

: **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**




1. **Komisi Pembimbing**

  
**Darmawan Purba, S. IP., M. IP.**

**NIP. 198106012010121003**

2. **Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan**

  
**Dr. Tabah Maryanah, S.I.P., M.Si.**

**NIP. 197106042003122001**

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua

: **Darmawan Purba, S. IP., M. IP.**



Penguji Utama

: **Prof. Dr. Feni Rosalia, M.Si.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

**Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.**

NIP. 1976082120 008 2 001



Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 12 Maret 2026

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang saya susun merupakan karya asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana, baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Skripsi ini sepenuhnya merupakan gagasan, rumusan dan hasil penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dan bimbingan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan menyebutkan nama pengarang serta dicantumkan di dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh melalui skripsi ini, serta sanksi lain sesuai dengan ketentuan dan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 12 Maret 2026  
pernyataan,



Angelina Oktaviana  
NPM 2216021044

## RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Angelina Oktaviana, dilahirkan di Kota Bumi pada tanggal 06 Oktober 2004. Peneliti merupakan anak terakhir dari tiga bersaudara dari Bapak Firdaus Ilham dan Ibu Supatmi. Peneliti memiliki dua orang kakak perempuan, pertama bernama Dellia Septi Novita Sari dan kedua bernama Ayuni Lisda Fitriyani.

Jenjang pendidikan peneliti dimulai dari Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Xaverius yang diselesaikan pada Tahun 2010, dilanjutkan Sekolah Dasar (SD) diselesaikan di SD Kristen 04 Srmenanti Lampung Timur, pada Tahun 2016, kemudian Sekolah Menengah Pertama (SMP) diselesaikan di SMPN 01 Mataram Baru pada Tahun 2019, dan melanjutkan kejenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMAN 01 Bandar Sribhawono Lampung Timur pada Tahun 2021. Pada tahun 2022 Peneliti terdaftar sebagai mahasiswa S-1 Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).

Selama peneliti melaksanakan studi pada jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung, pada tahun 2025, peneliti sempat mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I tahun 2026 selama 30 hari di Rejomulyo, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan. Pada bulan Maret 2026 – September 2026 melaksanakan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di BPSDM Provinsi Lampung.

## MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain).

Dan hanya kepada TUHAN mu lah engkau berharap.”

**(QS. Al-Insyirah, 6-8)**

“Jangan takut gagal, karena yang tidak pernah gagal hanyalah orang-orang yang tidak pernah melangkah.”

**(Buya Hamka)**

*“Welcome to the real world. It sucks. You’re gonna love it.”*

**(Season 1, Friends 1994 - Monica Geller)**

“Orang lain ga akan paham *struggle* dan masa sulit nya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian *success stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun tidak ada tepuk tangan. Kelak diri kita dimasa depan akan sangat banga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini.”

**(Angelina Oktaviana)**

## **PERSEMBAHAN**

Tiada lembar skripsi yang paling indah dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan, Bismillahirrahmanirrahim skripsi ini saya persembahkan untuk:

Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan pertolongan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Ibu saya tercinta yang selalu melangitkan doa-doa baik dan menjadikan motivasi untuk saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih sudah mengantarkan saya sampai ditempat ini, saya persembahkan karya tulis sederhana ini dan gelar untuk ibu.

Diri saya sendiri, Angelina Oktaviana karena telah mampu berusaha dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri walaupun banyak tekanan dari luar keadaan dan tidak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini.

Bapak dan Ibu Dosen Sarjana Ilmu Pemerintahan yang telah membimbing dan mengarahkan saya untuk menyelesaikan skripsi ini.

Sahabat dan teman-teman saya yang telah menemani dalam suka maupun duka  
Terima kasih atas segala waktu, usaha dan dukungan yang telah diberikan.

Terimakasih untuk segala yang mendoakan dan mendukung untuk selesainya skripsi ini, semoga kelak Allah menjadikan ini sebagai ladang pahala bagi kita semua.

Almamater Tercinta Universitas Lampung

## SANWANCANA

Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala, karena atas rahmat dan hidayah-Nya skripsi ini dapat diselesaikan.

Skripsi dengan judul **“Peran Kepemimpinan Digital Dalam Pemanfaatan Aplikasi Srikandi Sebagai Bagian Dari Implementasi E-Goverment (Studi di BPSDM Provinsi Lampung)”** adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan di Universitas Lampung.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM, ASEAN Eng. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Ibu Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Bapak Prof. Dr. Noverman Duadji, M.Si. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Arif Sugiono, M.Si. selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
5. Bapak Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.IP., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
6. Ibu Dr. Tabah Maryanah, S.IP. M.Si. selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan. Terimakasih bu sudah mendengarkan kritik dan saran untuk JIP agar lebih baik lagi.
7. Bapak Darmawan Purba, S.IP., M.IP sebagai Dosen Pembimbing. Terimakasih pak sudah memberikan arahan, kritik saran, kesediaan waktu untuk

membimbing, memberikan masukan, dan juga arahan yang disampaikan sangat berharga dalam membantu proses penyelesaian skripsi ini agar dapat menjadi skripsi yang lebih baik lagi. Terimakasih pak atas segala hal yang telah bapak berikan untuk saya, Semoga lelah bapak bisa menjadi ladang pahala bagi semua orang.

8. Ibu Prof. Dr. Feni Rosalia, M.Si. sebagai Dosen Penguji. Dengan penuh rasa hormat dan bangga peneliti mengucapkan terimakasih kepada ibu Feni. Terimakasih bu sudah bersedia menjadi dosen penguji peneliti, terimakasih bu sudah memberikan kesediaan waktu, kritik, dan saran yang membangun selama keberlangsungan skripsi, semoga kelak lelah ibu bisa menjadi ladang pahala bagi semua orang.
9. Bu Merta, Mba Wulan, dan Mba Shella selaku Staff Jurusan Ilmu Pemerintahan. Terimakasih sudah memberikan pelayanan yang terbaik demi keberlangsungan administratif peneliti dari Maba – Sarjana
10. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu namun tidak mengurangi rasa hormat dan terimakasih setinggi-tingginya untuk Bapak dan Ibu semua. Terimakasih pak, bu sudah menjadi guru terbaik demi masa depan peneliti, terimakasih atas ilmu dan jerih payah yang kalian berikan untuk kami para mahasiswa/i kalian semua. Semoga kelak segala hal yang diberikan bapak dan ibu kelak menjadi ladang pahala bagi semua orang.
11. Teristimewa untuk ibuku tercinta, Ibu Supatmi. Terima kasih atas segala jerih payah yang ibu berikan kepada peneliti sejak peneliti masih berada dalam kandungan hingga sampai pada titik hari ini, bahkan sampai pada waktu-waktu yang akan datang yang tidak akan pernah cukup untuk membalas semua pengorbanan ibu. Terima kasih bu, karena ibu telah mengusahakan begitu banyak hal untuk peneliti, memberikan kehidupan yang layak, menyediakan fasilitas yang terbaik, bahkan hingga jauh dari keluarga demi keberlangsungan hidup peneliti. Terimakasih bu sudah memberikan kepercayaan kepada peneliti untuk dapat keluar dari rumah, merantau, merubah nasib, dan kembali pulang agar dapat mengangkat derajat keluarga kecil kita. Mungkin hari ini saya belum bisa membahagiakan ibu, tetapi percayalah akan saya usahakan dengan apapun

untuk bisa membahagiakan ibu. Semoga Allah SWT selalu menjaga ibu, memberikan kesehatan, umur panjang, serta membalas segala kebaikan ibu dengan balasan yang terbaik.

12. Kepada kedua kakakku tercinta, Dellia Septi Novita Sari dan Ayuni Lisdia Fitriyani terimakasih sudah selalu berusaha memberikan yang terbaik adikmu. Kasih sayang dan dukungan mu sangat berarti dalam perjalanan Kehadiranmu adalah kekuatan yang tak tergantikan bagi penulis.
13. Teruntuk Almarhum Nenek, sosok yang paling kurindukan, kini cucumu telah tumbuh dewasa. Mungkin langkah ini tak sempat engkau saksikan secara langsung, namun setiap pencapaian ini tak pernah lepas dari jejak doa dan kasihmu yang tertanam kuat sejak awal kehidupan penulis. Terimakasih sudah menjadi sosok ibu yang semasa hidupnya selalu berusaha memberikan kehidupan yang baik bagi penulis, kasih sayang yang tiada henti, motivasi, serta doa yang bergitu berarti. Meski kehadiranmu singkat di dunia ini, penulis yakin, semangat dan cintamu tetap hidup, menyatu dalam langkah dan doa yang mengiringi penulis setiap hari.
14. Teruntuk pakde Hartoyo. Terima kasih atas segala perhatian, dukungan, dan kebaikan yang pakde berikan kepada peneliti selama ini. Terima kasih karena telah hadir dan banyak membantu dalam perjalanan hidup peneliti, bahkan sering kali menggantikan sosok ayah yang memberikan arahan, nasihat, serta dukungan ketika peneliti membutuhkannya.
15. Terima kasih kepada sahabat-sahabat penulis sejak kecil, Elly, Keke, dan Anis, yang selalu hadir memberikan tawa, dukungan, serta menghibur penulis di setiap masa sulit dan kesedihan. Kebersamaan dan perhatian kalian menjadi penguat bagi penulis untuk terus melangkah hingga sampai pada titik ini.
16. Terima kasih kepada sahabat senasibku, Hiyo Linda Maharani, yang selalu ada menemani penulis dalam setiap proses perjalanan perkuliahan. Terima kasih atas segala dukungan, kebersamaan, serta canda tawa yang selalu menguatkan penulis, terutama di saat-saat sulit selama menjalani masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
17. Terima kasih kepada Dhita Fitriyani, sahabat yang penulis kenal sejak kegiatan PKKMB dan menjadi salah satu sahabat pertama dalam perjalanan di bangku

perkuliahan. Terima kasih karena telah menemani, memberikan dukungan, serta tetap menjadi sahabat hingga saat ini dalam setiap proses yang penulis lalui di kampus..

18. Kepada seseorang yang sangat tidak kalah penting kehadirannya, Muhammad Ridho Novaldi, terimakasih selalu menemani saya dikala suka maupun duka, terimakasih telah tulus memberikan rasa kasih sayang terimakasih selalu berkontribusi baik tenaga, pikiran, materi, waktu, menemani, mendukung, serta menghibur penulis dalam kesedihan, terima kasih untuk semua doa baiknya, senangiyasa sabar menghadapi penulis, mendengarkan keluh kesah, menyakinkan dan memotivasi penulis untuk pantang menyerah sehingga penyusunan karya tugas akhir ini terselesaikan.
19. Teruntuk Rita Oktaviani sahabat yang kebersamai selama proses penulisan tugas akhir ini. Terima kasih sudah menjadi partner bertumbuh di segala kondisi yang terkadang tidak terduga, menjadi pendengar yang baik untuk penulis serta menjadi orang yang selalu memberikan semangat dan meyakinkan penulis bahwa segala masalah yang dihadapi selama proses skripsi akan berakhir.
20. Terimakasih kepada Klarisa, Intan, Tika, Nadia, Nasya, Asmarani, yang telah menjadi teman berjuang sejak semester pertama saat masa awal menjadi mahasiswa baru. Terimakasih atas bantuan dan telah menjadi teman baik semasa kuliah saya.
21. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pegawai di BPSDM Provinsi Lampung yang telah memberikan kesempatan, pengalaman, serta bantuan kepada penulis selama melaksanakan kegiatan magang dan proses penelitian. Dukungan, arahan, serta keterbukaan informasi yang diberikan sangat membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
22. Terimakasih untuk semua pihak yang sudah terlibat dalam hidup peneliti dan maaf jika tidak dapat disebutkan tetapi tidak mengurangi terimakasih dan hormat kepada kalian karena sudah melihat tumbuh kembang peneliti di masa-masa tertentu.
23. Terakhir penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada seseorang yang mungkin sering terlupakan, ya penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada diri sendiri karena tetap bertahan sampai pada tahap ini. Terimakasih karena

tidak menyerah dan berani melawan rasa takut, serta keraguan terbesar dalam diri, terimakasih untuk tidak menyerah tetapi memilih melangkah dan terus berjuang walau kadang tak tau arah. Sampai ditahap ini bukanlah hal yang mudah bagi anak kecil yang perjuangannya dipenuhi dengan benturan besar, perjalanan mu sangat tidak mudah tapi kamu sanggup melewati badai itu. Saya bangga padamu, saya tau perjalanan ini belum selesai, masih banyak ketidakpastian dan luka yang mungkin datang tetapi semoga kamu mampu melewatinya dan ingat kamu pantas untuk bahagia, kamu berhak bermimpi, dan kamu layak untuk sampai di tujuan itu. Teruslah hidup dan berjalan dengan niat yang baik. Terimakasih Angelina Oktaviana kamu Hebat sudah sejauh ini.

Akhir kata penulis berharap Allah SWT membalas semua kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan

Bandar Lampung, 12 Maret 2026

Penulis

Angelina Oktaviana

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>v</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	14
1.3 Tujuan Penelitian.....	15
1.4 Manfaat Penelitian .....	15
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>16</b>
2.1 Pengertian Peran .....	16
2.2 Pengertian Digital Leadership .....	17
2.3 <i>E-Government</i> .....	21
2.3.1 Konsep dan Definisi <i>E-Government</i> .....	21
2.3.2 Tujuan E-Government.....	22
2.3.3 Manfaat E- Government.....	23
2.4 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).....	25
2.4.1 Prinsip Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).....	25
2.4.2 Tujuan dan Sasaran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) .....	26
2.4.3 Manfaat Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).....	27
2.5 Aplikasi Srikandi .....	28
2.6 Kerangka Berpikir.....	30
<b>III. METODE PENELITIAN</b> .....	<b>32</b>
3.1 Tipe Penelitian .....	32
3.2 Lokasi Penelitian.....	32
3.3 Fokus Penelitian .....	33
3.4 Sumber Data.....	35
3.5 Informan Penelitian .....	36
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	37
3.7 Teknik Pengolahan Data .....	39
3.8 Teknik Analisis Data.....	40
3.9 Teknik Validasi Data.....	41

<b>IV. HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>45</b>
4.1 Profil Kepala BPSDM Provinsi Lampung .....	45
4.2 Gambaran Umum BPSDM Provinsi Lampung.....	47
4.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi BPSDM Provinsi Lampung.....	48
4.2.2 Sumber Daya Manusia di BPSDM Provinsi Lampung .....	53
4.2.3 Kondisi Pengelolaan Surat-Menyurat Sebelum Penerapan Aplikasi SRIKANDI di BPSDM Provinsi Lampung.....	54
4.2.4 Kondisi Pengelolaan Surat-Menyurat Setelah Penerapan Aplikasi SRIKANDI di BPSDM Provinsi Lampung.....	55
4.3 Hasil Penelitian .....	57
4.3.1 Digital Vision .....	59
4.3.2 <i>Digital Competence</i> (Kompetensi digital).....	68
4.3.3. <i>Digital Transformation Management</i> .....	75
4.3.4 <i>Employee Engagement</i> .....	81
4.4. Pembahasan .....	87
4.4.1 <i>Digital Vision</i> .....	89
4.4.2 <i>Digital Competence</i> (Kompetensi Digital).....	93
4.4.3 <i>Digital Transformation Management</i> .....	97
4.4.4 <i>Employee Engagement</i> .....	100
4.4.5 Kepemimpinan Digital dalam Mendukung Implementasi <i>E-         Government</i> .....	106
<b>V. PENUTUP .....</b>	<b>109</b>
5.1 Simpulan .....	109
5.2 Saran .....	110
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>112</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>116</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Rekapitulasi Surat Keluar per bulan Januari- Desember .....	6
2. Rekapitulasi Surat Keluar per Bidang Januari-Desember.....	6
3. Informan Penelitian .....	36
4. SDM Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Lampung .....	53
5. Tabel Rencana Strategis BPSDM Provinsi Lampung 2025-2029 .....	63

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Berpikir .....	31
2. Lokasi BPSDM Provinsi Lampung .....	47
3. Rapat Internal Pembahasan Implementasi SRIKANDI .....	61
4. Akun Kepala BPSDM Provinsi Lampung pada Aplikasi .....	70
5. Surat Keputusan Kepala BPSDM Provinsi Lampung tentang .....	73
6. Sistem pencatatan dan pengelolaan administrasi SRIKANDI .....	74
7. Surat Tugas Mengikuti Kegiatan Pendampingan Aplikasi Srikandi .....	77
8. Surat Keluar BPSDM Provinsi Lampung yang Diproses Secara .....	80
9. Status Penandatanganan dan Pengiriman Naskah pada Aplikasi .....	85
10. SOP Surat Keluar .....	88

## DAFTAR SINGKATAN

ANRI	: Arsip Nasional Republik Indonesia
ASN	: Aparatur Sipil Negara
BPSDM	: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
BSSN	: Badan Siber dan Sandi Negara
E-SAKIP	: Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan
LSPE	: Layanan Pengadaan Secara Elektronik
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
PANRB	: Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
PKTUF	: Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan Fungsional
PKM	: Pengembangan Kompetensi Manajerial
PKTI	: Pengembangan Teknis Inti
SIASN	: Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara
SIPD	: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
SPAN	: Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
SPBE	: Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
SRIKANDI	: Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi
SKPK	: Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan
SDM	: Sumber Daya Manusia
TIK	: Teknologi Informasi dan Komunikasi
VUCA	: Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Era global saat ini dikenal dengan istilah *VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, and Ambiguity)*, yaitu suatu kondisi yang ditandai oleh ketidakpastian, perubahan yang cepat, kompleksitas persoalan, serta ambiguitas dalam pengambilan keputusan. Dao (2023) menyatakan dalam menghadapi era *VUCA* ini, organisasi, termasuk instansi pemerintahan, dituntut untuk mampu beradaptasi secara cepat dan fleksibel terhadap segala bentuk perubahan, khususnya dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi. Dalam hal ini keterlibatan pegawai dalam proses pengambilan keputusan menjadi faktor penting dalam meningkatkan komitmen pemimpin terhadap tujuan organisasi dan keberhasilan dalam transformasi digital. Salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai adalah kepemimpinan, Kepemimpinan mempunyai kedudukan yang besar dalam bawa organisasi publik mengarahkan serta membawakan kepada pencapaian tujuan organisasinya (Cahyarini, 2021).

Dalam konteks digitalisasi, kepemimpinan digital dapat dipahami sebagai gaya kepemimpinan yang mengandalkan teknologi digital dalam proses mengelola sekaligus memimpin organisasi. Pendekatan ini mencakup pemanfaatan berbagai perangkat dan platform digital untuk melakukan koordinasi tim, mengatur jalannya proyek, serta mendorong terciptanya inovasi. Peran kepemimpinan digital semakin krusial seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan transformasi digital yang memengaruhi pola kerja organisasi maupun cara dunia usaha beroperasi (Wujarso et al., 2023).

Dalam konteks birokrasi, tantangan besar yang dihadapi adalah bagaimana para pemimpin di lingkungan pemerintahan mampu memanfaatkan teknologi digital secara optimal untuk mendukung kinerja organisasi dan mendorong terciptanya pelayanan publik yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Pemanfaatan teknologi dalam sektor publik tidak lagi bersifat opsional, melainkan menjadi suatu kebutuhan strategis dalam menghadapi dinamika lingkungan yang serba cepat dan kompleks. Wujarso et al., (2023) menyatakan kepemimpinan dalam era digital menuntut lebih dari sekadar pemahaman teknis, ia menuntut transformasi paradigma dalam pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan, hingga pelaksanaan program kerja.

Digital leadership yang efektif mampu mendorong perubahan budaya organisasi dari yang bersifat birokratis dan hirarkis menjadi lebih agile, kolaboratif, dan berbasis data, pemimpin birokrasi perlu mengedepankan kemampuan untuk mentransformasikan visi digital menjadi tindakan nyata. Sebagai bentuk respon terhadap tuntutan transformasi digital di sektor pemerintahan, pemerintah pusat telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). SPBE bertujuan untuk membangun tata kelola pemerintahan digital yang terpadu dan terintegrasi guna mendukung pelayanan publik yang berkualitas, transparan, dan efisien. Dalam pelaksanaannya, SPBE mewajibkan seluruh instansi pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, untuk menggunakan aplikasi-aplikasi umum yang bersifat wajib seperti SIPD, SP4N/LAPOR, SIASN, LPSE, SAKTI, E-SAKIP, termasuk SRIKANDI di bidang pengelolaan arsip. (Devina et al., 2024).

Di bidang kearsipan, kewajiban untuk menggunakan sistem digital ditegaskan melalui Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 679 Tahun 2020, yang secara resmi menetapkan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) sebagai aplikasi umum wajib nasional dalam pengelolaan arsip dinamis pada seluruh instansi pemerintahan. SRIKANDI merupakan aplikasi umum yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, SRIKANDI dibangun bersama Kementerian PAN-RB, ANRI, BSSN dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) untuk memenuhi

kebutuhan pembuatan surat menyurat dan arsip elektronik secara online serta terintegrasi (Sari, 2025).

Aplikasi SRIKANDI adalah platform umum dalam bidang kearsipan yang dirancang untuk mendukung pengelolaan arsip dan tata kelola pemerintahan secara elektronik. Aplikasi ini ditujukan bagi seluruh instansi, baik di tingkat pusat maupun daerah. Diharapkan bahwa dengan diimplementasikannya SRIKANDI, setiap Kementerian, Lembaga, maupun instansi pemerintah akan meningkatkan mutu dan akuntabilitas pengelolaan arsip, sehingga berperan sebagai memori kolektif bangsa. Penggunaan teknologi digital memungkinkan sistem pencatatan arsip yang lebih rapi serta mempermudah koordinasi antar-instansi pemerintah (Ditjen, 2023). Dalam penerapannya, Aplikasi SRIKANDI dirancang untuk mempermudah layanan administrasi kearsipan pemerintah agar menjadi lebih dinamis, handal, dan berkualitas. Selama ini, proses seperti surat-menyurat sering kali berjalan lambat, sulit dilacak, dan tidak efisien. Dengan hadirnya Aplikasi SRIKANDI, diharapkan dapat menjadi respons terhadap tantangan tersebut (Alamanda, 2024).

Penerapan Srikandi menjadi komponen penting dalam mendukung implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) dan mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Di Provinsi Lampung, implementasi SRIKANDI didukung oleh regulasi daerah, seperti Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan dan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan dan Arsip Elektronik. Dalam upaya percepatan implementasi digitalisasi kearsipan di daerah, Gubernur Lampung telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI). Surat edaran ini mewajibkan seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengimplementasikan aplikasi SRIKANDI secara menyeluruh sebagai sistem pengelolaan arsip dinamis berbasis elektronik. Kebijakan ini merupakan bentuk komitmen nyata Pemerintah Provinsi Lampung dalam mendorong modernisasi tata kelola kearsipan, serta memastikan

penyelenggaraan kearsipan yang tertib, efisien, dan terintegrasi sesuai standar nasional. Penerapan aplikasi SRIKANDI di Provinsi Lampung tidak lagi bersifat imbauan, melainkan sudah menjadi kewajiban formal yang diatur secara resmi melalui surat edaran gubernur.

Sebagai bentuk komitmen dalam mendukung digital di lingkungan pemerintahan daerah, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Lampung juga telah memasukkan penguatan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi ke dalam dokumen perencanaan strategis. Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) BPSDM Provinsi Lampung Tahun 2025–2029, khususnya pada Bab II halaman 21, tercantum arah kebijakan berupa penguatan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi melalui program Pengembangan e-Government OPD dan Publikasi Pembangunan. Program tersebut memiliki indikator kinerja berupa implementasi aplikasi e-government, yang secara langsung mencerminkan upaya organisasi dalam mengadopsi sistem administrasi berbasis digital.

Keberadaan program pengembangan e-government dalam dokumen Renstra tersebut menunjukkan bahwa perubahan digital bukan hanya menjadi tuntutan eksternal akibat kebijakan nasional seperti SPBE, tetapi juga telah menjadi bagian dari visi dan arah kebijakan internal organisasi. Dengan demikian, hal ini dapat diartikan bahwa pimpinan organisasi telah memiliki orientasi dan komitmen terhadap penerapan digitalisasi dalam tata kelola pemerintahan. Kondisi ini sekaligus mencerminkan adanya indikasi penerapan kepemimpinan digital (digital leadership), di mana pemimpin tidak hanya merespon perubahan, tetapi juga secara strategis memasukkan agenda digitalisasi ke dalam perencanaan organisasi.

Namun demikian, meskipun secara perencanaan telah menunjukkan adanya arah kebijakan menuju digitalisasi, implementasi di lapangan masih belum sepenuhnya optimal, khususnya dalam pemanfaatan aplikasi SRIKANDI di BPSDM Provinsi Lampung, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa penerapan aplikasi SRIKANDI di Provinsi Lampung secara umum masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari aspek, manajerial, maupun kesiapan sumber daya manusia.

Meskipun secara regulasi telah diwajibkan melalui Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor 80 Tahun 2025, implementasi di tingkat perangkat daerah belum sepenuhnya berjalan optimal. Hal ini terungkap dalam hasil evaluasi yang disampaikan oleh Direktorat Kearsipan Daerah II ANRI dalam kegiatan Bimbingan Konsultasi Pemantapan Implementasi Aplikasi SRIKANDI secara daring (Zoom) pada tanggal 20 Februari 2025. Informasi ini diperkuat melalui hasil wawancara dengan (Irvan Azhari Solong, S.H.), selaku Fungsional Arsiparis Ahli Muda Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Lampung, yang turut hadir dalam kegiatan evaluasi daring tersebut.

Dalam kegiatan evaluasi tersebut, disebutkan bahwa sebagian besar OPD di Provinsi Lampung masih mencatatkan jumlah transaksi dokumen di bawah 100 dokumen. Namun perlu ditegaskan bahwa angka “100 dokumen” tersebut belum memiliki dasar regulasi yang secara resmi ditetapkan oleh ANRI. Angka tersebut lebih bersifat sebagai indikator operasional yang digunakan dalam praktik pemantauan dan instrumen evaluasi pada saat kegiatan evaluasi daring (Zoom) berlangsung, untuk melihat tingkat aktivitas penggunaan aplikasi SRIKANDI di setiap perangkat daerah. Dengan kata lain, angka ini digunakan sebagai tolok ukur sementara dalam konteks monitoring implementasi, yang berasal dari praktik pemantauan atau instrument evaluasi operasional yang digunakan oleh ANRI.

Berdasarkan evaluasi tersebut, Provinsi Lampung ditetapkan masuk dalam kategori zona merah, yang menunjukkan bahwa pemanfaatan aplikasi SRIKANDI di lingkungan pemerintah daerah masih sangat rendah. Penetapan zona merah ini dilakukan berdasarkan data transaksi dokumen elektronik melalui aplikasi SRIKANDI di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang menunjukkan bahwa sebagian besar OPD di Provinsi Lampung masih mencatatkan jumlah transaksi di bawah 100 dokumen surat. Dari total 36 OPD yang ada, hanya 6 OPD yang tercatat telah berhasil mencatatkan transaksi lebih dari 100 dokumen melalui aplikasi SRIKANDI yaitu, Dinas pertenakan dan kesehatan hewan Provinsi Lampung, Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung, Dinas Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, dan Daerah Provinsi Lampung.

Sementara 30 OPD lainnya, termasuk Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Lampung, masih mencatatkan transaksi di bawah 100 dokumen. Informasi ini diperkuat melalui hasil wawancara dengan (Irvan Azhari Solong, S.H.), selaku Fungsional Arsiparis Ahli Muda Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Lampung, yang turut hadir dalam kegiatan evaluasi daring tersebut.

Hal ini disebabkan hingga waktu evaluasi pada Februari 2025, BPSDM belum melakukan transaksi pengelolaan arsip dinamis melalui aplikasi SRIKANDI. Kondisi tersebut terjadi karena proses implementasi aplikasi SRIKANDI di BPSDM baru dimulai pada bulan Juni 2025, sehingga seluruh aktivitas pengelolaan arsip dan surat keluar hingga awal tahun 2025 masih dilakukan secara manual. Meskipun demikian, dalam agregat penilaian Provinsi Lampung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Lampung tetap tercatat sebagai salah satu perangkat daerah yang belum aktif menggunakan aplikasi SRIKANDI, sehingga turut berkontribusi terhadap rendahnya peringkat Provinsi Lampung dalam penilaian nasional.

Berdasarkan data hasil rekapitulasi pengelolaan surat keluar selama Januari hingga Desember 2025, BPSDM mencatat total 907 surat keluar, yang terdiri atas:

1. Jumlah surat yang diproses via aplikasi SRIKANDI: 204 surat
2. Jumlah surat yang masih diproses secara manual: 704 surat
3. Persentase penggunaan SRIKANDI: hanya sekitar 22,5%
4. Persentase manual: masih dominan sekitar 77,5%

Data Pemanfaatan SRIKANDI di BPSDM Provinsi Lampung (Januari–Desember 2025) Berdasarkan hasil rekapitulasi pengelolaan surat keluar BPSDM Provinsi Lampung pada periode Januari–Desember 2025, diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 1. Rekapitulasi Surat Keluar per bulan Januari- Desember

<b>Bulan</b>	<b>Surat Via Srikandi</b>	<b>Surat Manual</b>	<b>Total</b>	<b>Presentase Srikandi (%)</b>	<b>Presentase Manual (%)</b>
Januari 2025	0 Surat	79 Surat	79 Surat	0,0% surat	100,0% surat
Febuari 2025	0 Surat	64 Surat	64 Surat	0,0% surat	100,0% surat
Maret 2025	0 Surat	51 Surat	51 Surat	0,0% surat	100,0% surat
April 2025	0 Surat	54 Surat	54 Surat	0,0% surat	100,0% surat
Mei 2025	1 surat	106 Surat	107 Surat	0,9% surat	99,1% surat
Juni 2025	11 Surat	104 Surat	115 Surat	9,6% surat	90,4% surat
Juli 2025	65 Surat	46 Surat	111 Surat	58,6% surat	41,6% surat
Agustus 2025	27 Surat	54 Surat	81 Surat	33,3% Surat	66,7% Surat
September 2025	35 Surat	44 Surat	79 Surat	44,3% Surat	55,7% Surat
Oktober 2025	28 Surat	48 Surat	76 Surat	36,8% Surat	63,2% Surat
November 2025	25 Surat	33 Surat	58 Surat	43,1% Surat	56,9% Surat
Desember 2025	12 Surat	20 Surat	32 Surat	37,5% Surat	62,5% Surat
<b>Total</b>	<b>204</b>	<b>703</b>	<b>907</b>	<b>22,5%</b>	<b>77,5%</b>

*Sumber: rekapitulasi Buku Surat Keluar (manual) dan data Surat Keluar pada Aplikasi SRIKANDI BPSDM Provinsi Lampung.*

Tabel 2. Rekapitulasi Surat Keluar per Bidang Januari-Desember

<b>Bidang</b>	<b>Surat Via Srikandi</b>	<b>Surat Manual</b>	<b>Total Surat</b>	<b>% Srikandi</b>	<b>% Manual</b>
Subbagian Umum	98 surat	417 surat	515 surat	19,0%	81,0%
PKTUF	22 surat	18 surat	40 surat	55,0 %	45,0%
PKM	21 surat	114 surat	135 surat	15,6 %	84,4%
SKPK	12 surat	33 surat	45 surat	26,7%	73,3%
PKTI	43 surat	57 surat	100 surat	43,0 %	57,0 %
Keuangan	8 surat	64 surat	72 surat	11,1%	88,9%
<b>Total Keseluruhan</b>	<b>204 surat</b>	<b>703 surat</b>	<b>907 surat</b>	<b>22,5%</b>	<b>77,5 %</b>

*Sumber: rekapitulasi Buku Surat Keluar (manual) dan data Surat Keluar pada Aplikasi SRIKANDI BPSDM Provinsi Lampung*

Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa selama lima bulan pertama, yaitu Januari hingga Mei 2025, BPSDM Provinsi Lampung belum memanfaatkan aplikasi SRIKANDI sama sekali, sehingga seluruh surat keluar masih diproses secara manual (100%). Pemanfaatan aplikasi SRIKANDI baru mulai terlihat pada Juni 2025 dengan persentase sebesar 9,6%, kemudian mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada Juli 2025 hingga mencapai 58,6%. Pada bulan-bulan berikutnya, penggunaan aplikasi SRIKANDI relatif berfluktuasi namun tetap menunjukkan keberlanjutan, yakni Agustus (33,3%), September (44,3%), Oktober (36,8%), November (43,1%), dan Desember (37,5%). Meskipun demikian, secara akumulatif hingga akhir tahun 2025, tingkat pemanfaatan aplikasi SRIKANDI masih tergolong rendah, yaitu hanya 22,5%, sedangkan pengelolaan surat secara manual masih mendominasi sebesar 77,5%.

Jika dilihat pada Tabel 2, terdapat perbedaan tingkat pemanfaatan aplikasi SRIKANDI antarbidang di BPSDM Provinsi Lampung. Bidang PKTUF (55,0%) dan PKTI (43,0%) menunjukkan tingkat penggunaan yang relatif lebih tinggi dibandingkan bidang lainnya. Sebaliknya, bidang PKM (15,6%) dan Keuangan (11,1%) masih menunjukkan tingkat pemanfaatan yang rendah dan cenderung bergantung pada proses manual. Bidang SKPK berada pada kategori menengah dengan persentase penggunaan sebesar 26,7%, meskipun secara jumlah surat relatif terbatas. Sementara itu, Subbagian Umum menjadi bidang dengan volume surat keluar terbesar, yaitu 515 surat, namun persentase penggunaan aplikasi SRIKANDI masih rendah (19,0%), sehingga kontribusinya terhadap upaya digitalisasi arsip secara keseluruhan masih belum optimal. Secara keseluruhan, dari 907 surat keluar yang diproduksi selama periode Januari hingga Desember 2025, hanya 204 surat (22,5%) yang telah diproses melalui aplikasi SRIKANDI, sedangkan 703 surat (77,5%) masih dikelola secara manual.

Rendahnya angka transaksi SRIKANDI ini menunjukkan bahwa proses digitalisasi arsip belum berjalan efektif di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung. Bahkan hingga bulan Mei 2025, seluruh surat keluar (100%) masih diproses secara manual. Baru pada bulan Juni dan Juli mulai terdapat peningkatan pemanfaatan aplikasi SRIKANDI, namun realisasinya masih

belum memenuhi standar minimal nasional, yakni target 100 transaksi per perangkat daerah, fenomena ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara ekspektasi transformasi digital dengan hasil aktual yang dicapai.

Sebagai langkah tindak lanjut atas rendahnya pemanfaatan aplikasi SRIKANDI, pada bulan Juni 2025 dilaksanakan kegiatan pendampingan penerapan aplikasi SRIKANDI oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung guna mendukung implementasi sistem kearsipan digital di BPSDM Provinsi Lampung. Pendampingan ini dibuktikan dengan adanya Surat Tugas Kepala BPSDM Provinsi Lampung Nomor: 000.5.3/864/VI.05/2025 tanggal 12 Juni 2025, yang menugaskan sejumlah aparatur BPSDM untuk mengikuti kegiatan pendampingan Aplikasi SRIKANDI yang dilaksanakan pada 13 Juni 2025 di Kantor Arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung.

Kegiatan pendampingan tersebut bertujuan untuk memperkuat pemahaman aparatur terhadap sistem kearsipan digital, memberikan asistensi teknis penggunaan aplikasi SRIKANDI, serta mendorong percepatan implementasi aplikasi sebagai bagian dari penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Langkah ini menunjukkan adanya komitmen dan keseriusan pemerintah daerah dalam mendukung transformasi digital melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan pengawasan terhadap penerapan sistem kearsipan elektronik. Meskipun demikian, keberadaan pendampingan tersebut belum sepenuhnya mampu menutup kesenjangan yang terjadi antara kebijakan dan praktik di lapangan. Kondisi ini menunjukkan masih adanya tantangan besar dalam memastikan seluruh pegawai benar-benar memahami, menguasai, dan menerapkan sistem digital secara konsisten. Dengan kata lain, keberhasilan implementasi aplikasi SRIKANDI tidak hanya ditentukan oleh kesiapan teknologi dan dukungan pelatihan, tetapi juga oleh peran kepemimpinan digital (*digital leadership*) dalam mengarahkan, mengontrol, serta menanamkan budaya kerja berbasis teknologi di lingkungan organisasi.

Kondisi tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan besar antara kebijakan yang mewajibkan penggunaan SRIKANDI dan pelaksanaan di lapangan. Faktor penyebabnya tidak hanya terletak pada aspek teknis atau keterbatasan SDM, tetapi

juga berhubungan dengan peran kepemimpinan digital (*digital leadership*) dalam mendorong, mengarahkan, dan memastikan transformasi digital berjalan optimal (Susarianto, 2024). Minimnya pemanfaatan aplikasi selama periode awal dapat mencerminkan lemahnya koordinasi lintas bidang, kurangnya monitoring, dan belum maksimalnya internalisasi visi digital oleh pimpinan. Dalam konteks ini, dibutuhkan sinergi lintas bidang di lingkungan BPSDM Provinsi Lampung, serta penguatan fungsi kontrol dan arah kebijakan dari pimpinan organisasi. Komitmen pimpinan menjadi faktor utama dalam mendorong optimalisasi penggunaan aplikasi SRIKANDI. Komitmen tersebut hanya dapat berkembang apabila pimpinan memiliki kesadaran (*awareness*) dan kepekaan terhadap pentingnya digitalisasi dalam pengelolaan administrasi pemerintahan. Di sinilah peran digital leadership menjadi sangat krusial dalam menggerakkan perubahan secara menyeluruh dan berkelanjutan (Susarianto, 2024).

Dalam era transformasi digital sektor publik, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi menjadi pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, efisien, dan transparan (Rahmadi, 2025). Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) merupakan salah satu bentuk inovasi pemerintah dalam mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Namun, keberhasilan implementasi aplikasi digital seperti SRIKANDI tidak semata-mata ditentukan oleh ketersediaan sistem dan infrastruktur, melainkan juga sangat bergantung pada peran kepemimpinan digital (*digital leadership*) dalam mengarahkan perubahan, membangun budaya digital, serta menggerakkan sumber daya manusia agar mampu beradaptasi dan berinovasi di era teknologi (Tulungan et al., 2022). Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap digital leadership menjadi krusial dalam mendukung keberlanjutan dan efektivitas transformasi digital di instansi pemerintah.

Kepemimpinan digital tidak hanya berfungsi sebagai penggerak teknis perubahan, tetapi juga sebagai katalis utama dalam membentuk visi organisasi, membangun budaya digital, serta mengarahkan pegawai dalam menghadapi perubahan berbasis teknologi (Wujarso et al., 2023). Oleh karena itu, penelitian ini mencoba untuk

mengisi celah tersebut dengan mengadopsi skala kepemimpinan digital dan mengkaji bagaimana pengaruhnya terhadap tingkat pemanfaatan aplikasi SRIKANDI. Penelitian ini juga mempertimbangkan faktor mediasi berupa kesiapan digital pegawai serta faktor moderasi seperti komitmen pimpinan dan dukungan infrastruktur, agar dapat memperoleh gambaran yang utuh mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas transformasi digital di sektor publik. Dalam konteks pemanfaatan aplikasi SRIKANDI di BPSDM Provinsi Lampung, kepemimpinan digital diyakini berperan penting dalam mengarahkan perubahan dari sistem manual menuju sistem kearsipan elektronik, memastikan pegawai memiliki kesiapan digital, dan membangun komitmen bersama untuk menjalankan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Sebagai landasan dalam mengidentifikasi permasalahan serta posisi penelitian ini, beberapa studi terdahulu telah dilakukan terkait implementasi dan pemanfaatan aplikasi SRIKANDI di berbagai instansi pemerintahan. Berikut ini disajikan lima penelitian terdahulu yang relevan dan menjadi pijakan awal dalam menyusun penelitian ini:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Riyanto Wujarso, Bayu Seno Pitoyo, dan Roy Prakoso (2023) yang berjudul “Peran Kepemimpinan Digital dalam Era Digital” menjelaskan bahwa kepemimpinan digital berperan penting dalam meningkatkan efektivitas dan daya saing organisasi di tengah perkembangan teknologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemimpin yang memiliki visi digital, kemampuan mengelola perubahan, dan literasi teknologi mampu mendorong transformasi organisasi menuju arah yang lebih inovatif dan adaptif. Kelebihan penelitian ini adalah memberikan gambaran komprehensif mengenai peran strategis kepemimpinan digital dalam menghadapi tantangan era disrupsi. Kekurangannya, penelitian ini masih bersifat konseptual dan belum secara spesifik meneliti penerapan kepemimpinan digital dalam sektor pemerintahan. Perbedaan dengan penelitian saya terletak pada fokus kajian, di mana penelitian saya menitikberatkan pada praktik kepemimpinan digital dalam mendorong pemanfaatan aplikasi SRIKANDI di lingkungan BPSDM Provinsi Lampung.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Hesti Melliasari, Isa Dwiyono, Purwadhi, dan Yani Restiani Widjaya (2024) yang berjudul “Digital Leadership Skill dan

Peranannya bagi Kepemimpinan Institusi Pelayanan Kesehatan di Era Digital” membahas bagaimana keterampilan kepemimpinan digital berpengaruh terhadap efektivitas pelayanan organisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan pemimpin dalam memahami teknologi, membangun budaya inovatif, dan memimpin tim virtual menjadi faktor utama keberhasilan transformasi digital di institusi pelayanan kesehatan. Kelebihan penelitian ini adalah menyoroti pentingnya keterampilan digital yang spesifik dalam meningkatkan kinerja organisasi berbasis layanan publik. Kekurangannya, penelitian ini bersifat tinjauan pustaka dan belum menyajikan data empiris dari praktik kepemimpinan digital di lapangan. Perbedaan dengan penelitian saya terletak pada pendekatan dan konteks; penelitian saya menggunakan pendekatan kualitatif dan berfokus pada instansi pemerintahan daerah yang menerapkan sistem e-government melalui aplikasi SRIKANDI.

3. Penelitian Novie Indrawati Sagita Malvie Prathama (2020) yang berjudul “Kepemimpinan Bupati dalam Mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Studi pada Program E-SAKIP Desa di Kabupaten Sumedang Tahun 2020)”, hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan Bupati memiliki peran strategis dalam keberhasilan program melalui visi yang jelas, penguatan koordinasi lintas perangkat daerah, dan penyediaan infrastruktur pendukung. Kelebihan penelitian ini adalah memberikan gambaran detail praktik kepemimpinan kepala daerah dalam mengimplementasikan kebijakan berbasis digital di tingkat desa. Kekurangannya, penelitian ini hanya berfokus pada program E-SAKIP Desa dan belum mengkaji aplikasi e-government lain seperti SRIKANDI. Perbedaan dengan penelitian saya terletak pada objek kajian; penelitian ini membahas kepemimpinan kepala daerah pada program E-SAKIP
4. Penelitian yang dilakukan oleh Rranba dan Adra (2023) yang berjudul “Peran Kepemimpinan Digital dalam Meningkatkan Efektivitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Bangka” menunjukkan bahwa kepemimpinan digital berperan signifikan dalam mempercepat penerapan SPBE melalui visi digital yang jelas, pemberdayaan

pegawai, dan optimalisasi infrastruktur teknologi. Faktor pendukungnya meliputi komitmen pimpinan, regulasi, serta ketersediaan sarana prasarana, sedangkan hambatannya adalah keterbatasan SDM digital dan resistensi terhadap perubahan. Penelitian ini relevan karena sama-sama mengkaji peran kepemimpinan digital di sektor publik, namun berbeda fokus. Rranba & Adra membahas SPBE secara umum, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada pemanfaatan aplikasi SRIKANDI di BPSDM Provinsi Lampung. Dengan demikian, penelitian ini mengisi celah kajian sebelumnya dengan melihat pengaruh kepemimpinan digital terhadap penggunaan aplikasi e-government spesifik.

5. Penelitian Nurul Khaira (2024) yang berjudul “Peran Literasi Digital dan Kepemimpinan Digital terhadap Kinerja Karyawan: Studi Kasus Generasi Milenial dan Z di GoTo Group” menunjukkan bahwa kepemimpinan digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kinerja karyawan di perusahaan digital. Hasil penelitian juga menemukan bahwa budaya digital belum mampu memoderasi hubungan antara kepemimpinan digital dan kinerja, sehingga menegaskan pentingnya peran aktif pemimpin dalam mengoptimalkan teknologi dan komunikasi digital di organisasi. Kelebihan penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis yang kuat untuk menunjukkan hubungan antarvariabel. Kekurangannya, penelitian ini berfokus pada sektor swasta dan generasi milenial, sehingga belum menggambarkan dinamika kepemimpinan digital di sektor pemerintahan. Perbedaan dengan penelitian saya adalah pada objek dan pendekatan; penelitian saya berfokus pada pemimpin instansi pemerintahan daerah serta menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali lebih dalam bagaimana kepemimpinan digital berperan dalam efektivitas pemanfaatan aplikasi SRIKANDI.

Secara keseluruhan, kelima penelitian terdahulu memberikan kontribusi yang penting dalam memperkaya pemahaman mengenai kepemimpinan digital, baik dari aspek kompetensi pemimpin, pengaruh terhadap kinerja, maupun perannya dalam mendorong transformasi digital di berbagai sektor. Namun demikian, mayoritas penelitian tersebut masih berfokus pada konteks umum organisasi atau

sektor swasta, dan belum secara spesifik meneliti penerapan kepemimpinan *digital* dalam pemanfaatan sistem *e-government* di instansi pemerintahan. Dengan demikian, masih terdapat ruang penelitian yang belum banyak dieksplorasi, yaitu kajian mengenai bagaimana peran kepemimpinan digital memengaruhi keberhasilan implementasi aplikasi SRIKANDI di lingkungan pemerintah daerah.

Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menjadikan digital leadership sebagai variabel utama yang dikaji. Penelitian ini akan menganalisis secara mendalam bagaimana bentuk, strategi, dan pengaruh kepemimpinan digital terhadap tingkat pemanfaatan aplikasi SRIKANDI di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung, termasuk faktor pendukung dan penghambatnya. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan kajian kepemimpinan digital di sektor publik, serta kontribusi praktis berupa rekomendasi strategis untuk memperkuat implementasi transformasi digital, khususnya dalam bidang kearsipan elektronik di lingkungan pemerintah daerah.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian dengan judul “Peran Kepemimpinan Digital dalam Pemanfaatan Aplikasi Srikandi sebagai Bagian dari Implementasi *E-Government*: Studi di BPSDM Provinsi Lampung” menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana peran pimpinan dalam memimpin proses transformasi digital khususnya dalam pemanfaatan aplikasi Srikandi, serta menggali strategi penguatan *digital leadership* dalam birokrasi guna mewujudkan implementasi *e-government* yang optimal.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana peran digital leadership dalam mendorong pemanfaatan aplikasi SRIKANDI di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung?.

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah penelitian tersebut, maka tujuan penelitian ini untuk menganalisis peran *digital leadership* dalam mendorong pemanfaatan aplikasi SRIKANDI di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung, dengan menelaah bagaimana gaya kepemimpinan digital memengaruhi kesiapan organisasi dalam melakukan transformasi digital, membentuk budaya kerja berbasis teknologi, serta mendorong penggunaan sistem administrasi kearsipan secara elektronik sesuai dengan kebijakan SPBE yang berlaku.

### 1.4 Manfaat Penelitian

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya dalam bidang manajemen digital dan kepemimpinan digital di sektor pemerintahan. Penelitian ini juga memperkaya kajian tentang kepemimpinan digital sebagai variabel penting dalam keberhasilan implementasi *e-government*.

#### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi: Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pimpinan dan pengambil kebijakan di BPSDM Provinsi Lampung maupun instansi pemerintah lainnya dalam mengoptimalkan peran kepemimpinan digital untuk mendukung transformasi sistem administrasi melalui aplikasi SRIKANDI. Hasil penelitian juga dapat dijadikan rujukan dalam merumuskan strategi peningkatan kompetensi pimpinan dan pegawai dalam penggunaan teknologi informasi.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Pengertian Peran

Secara etimologi, kata peran berasal dari istilah *role* dalam bahasa Inggris yang berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan oleh seseorang dalam kehidupan sosial. Dalam kajian sosiologi dan ilmu administrasi, istilah "peran" dan "peranan" seringkali digunakan secara bergantian dalam percakapan sehari-hari, namun keduanya memiliki perbedaan makna yang perlu dipahami secara akademis. Peran (*role*) merujuk pada seperangkat harapan, norma, dan ekspektasi sosial yang melekat pada seseorang yang menempati posisi atau status tertentu dalam suatu sistem sosial, sedangkan peranan lebih mengacu pada tindakan nyata atau pelaksanaan aktual dari peran tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, peran adalah "apa yang seharusnya dilakukan," sementara peranan adalah "apa yang sesungguhnya dilakukan" oleh pemegang posisi tersebut (Muallif, 2024).

Secara konseptual, peran adalah suatu konsep yang digunakan oleh setiap orang yang berinteraksi dalam suatu kelompok atau organisasi untuk bertindak sehubungan dengan tugas dan tanggung jawabnya. Peran adalah sesuatu yang dikerjakan atau dijalankan, yaitu tugas atau tanggung jawab seseorang dalam suatu organisasi atau tempat kerja. Ketika peran didefinisikan sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan untuk memenuhi hak dan tanggung jawab posisinya, maka orang tersebut dapat memenuhi peran tersebut (Tidangen et al., 2020). Definisi ini menegaskan bahwa peran bukan sekadar jabatan atau posisi formal, melainkan juga mencakup ekspektasi perilaku nyata yang harus diwujudkan oleh pemegang posisi tersebut dalam interaksi sosial dan organisasional sehari-hari.

Suharto (dalam Setiawan et al., 2023) mengemukakan beberapa dimensi peran, yaitu: peran sebagai suatu kebijakan, di mana peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan; peran sebagai strategi, di mana peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat; dan peran sebagai alat komunikasi, di mana peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan.

Sementara itu, dalam konteks organisasi, peran adalah suatu konsep yang digunakan oleh setiap orang yang berinteraksi dalam suatu kelompok atau organisasi untuk bertindak sehubungan dengan tugas dan tanggung jawabnya. Peran adalah sesuatu yang dikerjakan atau dijalankan, yaitu tugas atau tanggung jawab seseorang dalam bisnis atau di tempat kerja. Ketika peran didefinisikan sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan untuk memenuhi hak dan tanggung jawab posisinya, maka orang tersebut dapat memenuhi peran tersebut (Susarianto 2024).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa peran adalah seperangkat tingkah laku, tugas, tanggung jawab, dan harapan yang dilekatkan kepada seseorang berdasarkan kedudukan atau posisi yang diembannya dalam suatu organisasi atau sistem sosial, yang bersifat dinamis dan diwujudkan melalui tindakan nyata dalam menjalankan hak dan kewajibannya.

## **2.2 Pengertian Digital Leadership**

Dalam era transformasi digital yang semakin berkembang, *digital leadership* menjadi faktor penting dalam meningkatkan kinerja organisasi. Menurut Westerman et al (2014) dalam (Syahfitri et al 2025) mendefinisikan digital leadership merupakan sebagai kemampuan pemimpin untuk memimpin organisasi dalam memanfaatkan teknologi digital secara maksimal, menggabungkan visi strategis, pengelolaan perubahan, dan inovasi berbasis teknologi. Westerman et al., *digital leadership* memiliki beberapa variabel utama, antara lain:

1. *Digital Vision* (Visi Digital), digital vision adalah kemampuan pemimpin untuk melihat ke depan, berinovasi, dan menghadapi ketidakpastian dalam lanskap digital, serta mengidentifikasi kapan perubahan digital diperlukan untuk memasukkannya ke dalam agenda organisasi.
  - a. Pemimpin memiliki visi digital yang jelas.
  - b. Pemimpin mampu mengenali peluang dan tantangan dalam era transformasi digital.
  
2. *Digital Competence* (Kompetensi Digital), mengindikasikan bahwa kompetensi digital mencakup kemampuan dan keahlian yang dibutuhkan untuk beroperasi dan berhasil dalam lingkungan digital
  - a. Pemimpin menguasai teknologi digital.
  - b. Pemimpin mampu mengintegrasikan teknologi ke dalam proses kerja organisasi secara efektif.
  
3. *Digital Transformation Management* (Manajemen Transformasi Digital), adalah proses integrasi teknologi digital ke dalam semua aspek bisnis, mengubah cara organisasi memberikan nilai kepada pelanggan dan memandu perusahaan melalui perubahan digital dengan menekankan pentingnya kepemimpinan dan pemanfaatan teknologi untuk inovasi dan peningkatan kinerja bisnis
  - a. Pemimpin mampu mengelola perubahan organisasi menuju sistem digital secara terencana dan efisien.
  - b. Pemimpin mampu menyelaraskan model bisnis organisasi agar selaras dengan praktik dan teknologi digital baru.
  
4. *Employee Engagement* (Keterlibatan Karyawan), merujuk pada keterikatan (*engagement*) karyawan terhadap pekerjaan dan perusahaan, yang ditandai dengan motivasi tinggi, loyalitas, dan kemauan untuk memberikan kontribusi melebihi tanggung jawab tugas pokoknya.
  - a. Pemimpin mendorong partisipasi aktif pegawai dalam penggunaan teknologi digital.
  - b. Pemimpin membangun budaya kerja yang kolaboratif & mendukung

penggunaan digital secara bersama-sama.

Menurut Avalio et al., (2000) mendefinisikan Kepemimpinan digital atau e-leadership dapat dipahami sebagai proses memengaruhi secara sosial dengan perantara teknologi digital, yang ditujukan untuk menciptakan perubahan pada sikap, emosi, pola pikir, perilaku, maupun kinerja baik di tingkat individu, kelompok, maupun organisasi. Dari pengertian tersebut terlihat bahwa kepemimpinan digital merupakan bentuk kepemimpinan yang memanfaatkan teknologi dengan tujuan mendorong transformasi di seluruh lapisan organisasi.

Dalam memilih landasan teori untuk penelitian ini, saya memilih teori Westerman et al (2014). karena teori tersebut memberikan kerangka yang komprehensif dan aplikatif untuk memahami bagaimana pemimpin organisasi dapat secara strategis mengelola transformasi digital. Dengan variabel-variabel seperti visi digital, kompetensi digital, manajemen perubahan, dan keterlibatan karyawan, teori Westerman memungkinkan kajian yang lebih konkret dan relevan dalam konteks organisasi yang sedang berproses menjadi organisasi digital.

*Digital leadership* di era transformasi digital merupakan faktor penting yang memiliki pengaruh besar terhadap kinerja organisasi. Peran ini tercermin dari kemampuan seorang pemimpin dalam memberikan arahan, mendorong motivasi, serta membimbing pegawai agar dapat beradaptasi di tengah dinamika lingkungan kerja yang senantiasa mengalami perubahan.

Beberapa faktor yang memengaruhi *digital leadership*. Pertama, kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi menjadi salah satu aspek utama yang menentukan efektivitas kepemimpinan digital. (Samuel dan Ramli., 2025) menemukan bahwa *digital leadership* memiliki dampak positif terhadap kinerja pegawai, di mana pemimpin yang mampu memanfaatkan teknologi serta mendigitalisasi proses organisasi dapat meningkatkan keterlibatan, produktivitas, komitmen, dan pemberdayaan pegawai.

Kedua, salah satu faktor yang turut memengaruhi keberhasilan *digital leadership* dalam sebuah organisasi adalah komitmen. (Novita, 2022) menjelaskan bahwa

ketika pegawai memiliki rasa keterikatan yang kuat terhadap organisasinya, mereka cenderung menunjukkan produktivitas yang lebih tinggi serta lebih cepat menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan yang diarahkan oleh pimpinan. Ketiga, motivasi juga menjadi faktor penting yang memengaruhi efektivitas digital leadership. Dalam konteks organisasi, motivasi sering berfungsi sebagai variabel mediasi yang krusial. (Yulistia dan Yanti., 2023) mengungkapkan bahwa kepuasan kerja yang tinggi dapat terbentuk melalui kepemimpinan yang efektif serta budaya organisasi yang kondusif, sehingga secara langsung mampu meningkatkan kinerja pegawai.

Berdasarkan berbagai pandangan para ahli dan hasil penelitian yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa *digital leadership* merupakan bentuk kepemimpinan yang berfokus pada pemanfaatan teknologi digital untuk mengarahkan, memotivasi, serta membimbing pegawai dalam menghadapi dinamika organisasi di era transformasi digital. *Digital leadership* tidak hanya menuntut seorang pemimpin memiliki visi digital yang jelas, tetapi juga menuntut penguasaan kompetensi teknologi, kemampuan mengelola perubahan, serta keterampilan dalam membangun kolaborasi dengan seluruh anggota organisasi. Berbagai indikator seperti inovasi, kompetensi digital, komunikasi virtual, kemampuan beradaptasi, partisipasi, hingga visi strategis menunjukkan bahwa digital leadership adalah kepemimpinan yang multidimensi dan kompleks.

Efektivitas digital leadership dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, antara lain kemampuan adaptasi terhadap perkembangan teknologi, penerapan gaya kepemimpinan transformasional, budaya organisasi yang positif, komitmen, dan motivasi pegawai. Dengan demikian, *digital leadership* dapat dipahami sebagai salah satu kunci strategis yang berperan signifikan dalam meningkatkan kinerja, memperkuat keterlibatan pegawai, dan mendorong organisasi untuk tetap kompetitif di tengah perubahan lingkungan yang serba cepat.

## 2.3 *E-Government*

### 2.3.1 Konsep dan Definisi *E-Government*

*E-Government*, yang merupakan singkatan dari *Electronic Government*, dapat dipahami sebagai salah satu model tata kelola pemerintahan yang mengandalkan pemanfaatan teknologi digital. Dalam konsep ini, seluruh aktivitas administrasi, pelayanan kepada masyarakat, pengawasan, hingga pengendalian berbagai sumber daya organisasi seperti keuangan, pajak, retribusi, maupun pengelolaan aparatur dihubungkan dalam satu sistem yang terintegrasi. (Fauzi dan Purnamawati 2025) menyebut bahwa *e-government* menitikberatkan pada aspek administratif dan teknis penggunaan TIK, seperti digitalisasi arsip dan aplikasi pelayanan publik, sementara *e-governance* memperluas konteks hingga partisipasi masyarakat dan pelibatan sektor swasta dalam pemerintahan.

Menurut Rifdan et al., (2024). *e-Government* dapat dipahami sebagai penerapan teknologi informasi dan komunikasi oleh pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas layanan publik sehingga masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan transparan. Selain itu, *e-government* juga diarahkan untuk memperbaiki efisiensi operasional birokrasi dengan memangkas prosedur yang rumit, mengurangi biaya administrasi, serta mempercepat alur kerja antar instansi pemerintah. Tidak hanya itu, konsep ini juga membuka ruang partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan, misalnya melalui penyampaian aspirasi, pengawasan kebijakan, maupun keterlibatan dalam pengambilan keputusan berbasis digital.

Senada dengan itu, World Bank mendefinisikan *e-government* sebagai pemanfaatan teknologi informasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, pelaku bisnis, dan mendukung kerja sama dengan lembaga lain, dengan tujuan utama memberdayakan masyarakat melalui akses informasi yang lebih luas (Lenak et al., 2021)

Dari berbagai definisi mengenai *e-government* yang dikemukakan oleh para ahli maupun penelitian sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa *e-government*

memiliki tujuan utama untuk meningkatkan transparansi serta mempererat interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Konsep ini melibatkan pemanfaatan beragam platform digital, seperti situs web resmi, aplikasi berbasis mobile, media sosial, hingga layanan elektronik lainnya, guna mempermudah masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkan layanan publik. Selain itu, *e-government* juga mencerminkan integrasi teknologi ke dalam berbagai aktivitas pemerintahan, mulai dari pengolahan data, pengelolaan sumber daya, hingga proses pengambilan keputusan.

### 2.3.2 Tujuan E-Government

Adapun tujuan dari *e-government* menurut Muqoffa, (2022) adalah menciptakan jaringan informasi serta layanan publik yang dapat diakses kapan saja dan dari mana saja tanpa terbatas oleh ruang maupun waktu, serta dapat dimanfaatkan masyarakat dengan biaya yang relatif terjangkau. Secara umum, implementasi *e-government* di berbagai negara yang menjadi objek kajian memiliki sejumlah sasaran pokok, antara lain:

1. Meningkatkan mutu layanan publik, khususnya dalam mempercepat prosedur pelayanan, menyederhanakan birokrasi, serta memberikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk berinteraksi dengan pemerintah.
2. Mendorong keterbukaan pemerintahan, dengan memperluas ketersediaan informasi publik yang dapat diakses secara bebas oleh masyarakat sebagai wujud transparansi.
3. Memperkuat akuntabilitas pemerintah, melalui penyediaan berbagai layanan serta informasi yang lebih lengkap, sekaligus membuka jalur akses baru bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan melakukan pengawasan.
4. Menghemat waktu, biaya, dan sumber daya lainnya, baik di pihak pemerintah maupun masyarakat, dengan mempersingkat proses pelayanan sehingga menjadi lebih efisien dan efektif.

Rahmaini (2021) menegaskan bahwa penerapan *e-government* bertujuan untuk menciptakan praktik pemerintahan yang efisien, efektif, terjangkau, dan mampu

memperluas akses masyarakat terhadap informasi publik. Prinsip *e-government* juga menekankan asas akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik sebagai pilar utama dalam reformasi birokrasi modern. Dengan prinsip-prinsip tersebut, implementasi *e-government* diharapkan dapat memperbaiki produktivitas dan efisiensi birokrasi, mengurangi potensi praktik korupsi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik yang lebih cepat, tepat, dan transparan.

Dengan kata lain, *e-Government* tidak hanya berfokus pada digitalisasi layanan semata, melainkan juga diarahkan untuk membangun tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka, responsif, efisien, serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal.

### **2.3.3 Manfaat E- Government**

Di sisi lain, penerapan *e-government* memberikan berbagai manfaat nyata (Muqoffa, 2022):

1. Penerapan *e-government* memberikan kemudahan bagi warga negara dalam memperoleh layanan serta melakukan interaksi langsung dengan pemerintah. Melalui sistem ini, efisiensi dan efektivitas birokrasi dapat ditingkatkan sekaligus memperkuat tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat. Dengan adanya dukungan teknologi informasi, layanan publik bisa diakses kapan saja, selama 24 jam penuh, hanya dengan memanfaatkan jaringan internet, sehingga kualitas pelayanan menjadi lebih baik dibandingkan sebelumnya.
2. Selain itu, *e-government* juga memberikan nilai tambah berupa penyederhanaan prosedur pelayanan publik, mengurangi tumpang tindih birokrasi, serta memastikan masyarakat dapat mengakses informasi dan layanan secara lebih mudah. Melalui integrasi sistem pemerintahan, proses transaksi dan operasional dapat dilakukan lebih ringkas, sehingga mempercepat aliran kerja di dalam lembaga pemerintahan.
3. Manfaat lain dari penerapan *e-government* adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik melalui transparansi dan akuntabilitas yang lebih terjamin.

Dengan adanya digitalisasi, biaya transaksi dapat ditekan, komunikasi antar lembaga pemerintahan menjadi lebih cepat, dan interaksi dengan masyarakat berlangsung secara lebih terbuka. Hal ini mendorong terbentuknya masyarakat yang berbasis pada komunitas informasi yang lebih maju. Selain meningkatkan efisiensi kerja antarlembaga, penerapan *e-government* juga membuka peluang bagi pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara, khususnya melalui optimalisasi sistem perpajakan.

Penerapan *e-government* memberikan berbagai manfaat strategis dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Menurut (Lestari et al., 2021), salah satu manfaat utama dari *e-government* adalah meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, kenyamanan, dan aksesibilitas layanan publik. Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan pelayanan dilakukan lebih cepat, mengurangi hambatan birokrasi, serta menjangkau masyarakat secara lebih luas.

*E-government* juga berperan penting dalam mengurangi biaya administrasi karena proses layanan dapat dialihkan ke sistem daring, sehingga penggunaan anggaran menjadi lebih hemat dan tepat sasaran. (Lestari et al., 2021) menegaskan bahwa penerapan sistem online mampu mengurangi beban administratif, meningkatkan keterbukaan informasi, serta memperkuat akuntabilitas pemerintah karena masyarakat dapat secara langsung mengakses informasi dan memantau kinerja lembaga publik.

Manfaat lainnya adalah peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pelayanan publik. Dengan sistem *e-government*, warga tidak lagi harus datang langsung ke kantor instansi, melainkan dapat mengakses layanan secara daring. Hal ini sejalan dengan tujuan mewujudkan asas pelayanan publik seperti keterbukaan, partisipatif, akuntabilitas, kecepatan, ketepatan waktu, dan keterjangkauan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lestari et al., 2021). Dengan demikian, penerapan *e-government* tidak hanya memperbaiki kinerja birokrasi, tetapi juga

menjadi instrumen penting dalam memperkuat prinsip *good governance*, mengurangi potensi *maladministrasi*, dan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

## **2.4 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)**

Menanggapi pesatnya perkembangan era digital. Pemerintah republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau disingkat SPBE (Presiden, 2018). SPBE adalah sebuah kerangka kerja yang dirancang untuk menjamin terselenggaranya pengaturan, pengarahannya, serta pengawasan dalam implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik, baik pada tingkat pemerintah pusat, provinsi, maupun daerah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terbuka dan saling terintegrasi. guna mencapai sasaran tersebut, penerapan SPBE perlu dilaksanakan melalui serangkaian aktivitas yang berlandaskan pada prinsip-prinsip tertentu.

### **2.4.1 Prinsip Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)**

Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, pemerintah telah menetapkan tujuh prinsip utama yang menjadi dasar dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yaitu:

1. Efektivitas, yakni memaksimalkan pemanfaatan sumber daya dalam mendukung SPBE sesuai dengan kebutuhan organisasi.
2. Integrasi, yaitu penyatuan berbagai sumber daya yang menunjang pelaksanaan SPBE agar berjalan selaras.
3. Keberlanjutan, yaitu penerapan SPBE yang konsisten dengan adanya rencana yang jelas, tahapan terstruktur, serta pengelolaan perkembangan sesuai kondisi yang dihadapi.
4. Efisiensi, yaitu pemanfaatan sumber daya SPBE secara optimal agar tepat

sasaran dan memberikan hasil yang bermanfaat.

5. Akuntabilitas, yaitu adanya kejelasan fungsi, peran, dan tanggung jawab dalam setiap pelaksanaan SPBE.
6. Interoperabilitas, yakni kemampuan untuk melakukan koordinasi serta kolaborasi antar proses bisnis dan sistem informasi guna mendukung pertukaran data, informasi, dan layanan SPBE.
7. Keamanan, yaitu upaya menjaga kerahasiaan, keaslian, integritas, serta ketersediaan seluruh sumber daya yang berkaitan dengan SPBE.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) diharapkan mampu menjadi pusat koordinasi dalam membangun integrasi yang menyeluruh untuk mewujudkan birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi. Sasaran dari penerapan SPBE mencakup empat aspek utama, yaitu terciptanya tata kelola serta manajemen SPBE yang efektif dan efisien, terselenggaranya layanan SPBE yang terintegrasi dan berorientasi pada pengguna, terbangunnya infrastruktur SPBE yang saling terkoneksi, serta meningkatnya kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan SPBE. Pencapaian keempat aspek tersebut tidak dapat dilepaskan dari penerapan prinsip-prinsip SPBE secara konsisten. Prinsip tersebut menjadi landasan penting agar penyelenggaraan SPBE benar-benar berjalan optimal dengan dukungan kemajuan teknologi. Prinsip-prinsip ini tidak hanya dipahami sebagai pengetahuan teoritis, melainkan harus diimplementasikan dalam praktik penyelenggaraan SPBE. Pelaksanaan SPBE yang selaras dengan prinsip-prinsip tersebut akan berdampak pada kepuasan layanan, standar etika, kemampuan komunikasi, serta berbagai indikator lain yang dapat dijadikan ukuran keberhasilan.

#### **2.4.2 Tujuan dan Sasaran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)**

Selain memiliki visi dan misi, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) juga dirancang dengan sejumlah tujuan utama, di antaranya:

1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, serta bebas dari praktik penyalahgunaan.
2. Menyediakan layanan publik yang berkualitas tinggi, mudah diakses, dan

mampu menumbuhkan kepercayaan masyarakat.

### 3. Menghadirkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi

Dalam rangka mencapai hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) melakukan evaluasi terhadap implementasi SPBE di tingkat kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota untuk memastikan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi berjalan sesuai prinsip efektivitas, efisiensi, serta tata kelola yang baik.

Berdasarkan visi, misi, serta tujuan yang telah ditetapkan, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) memiliki sejumlah sasaran utama, yaitu:

1. Terbangunnya tata kelola dan manajemen SPBE yang berjalan secara efektif serta efisien.
2. Terciptanya layanan SPBE yang menyatu, terkoordinasi, dan berfokus pada kebutuhan pengguna.
3. Terlaksananya penyediaan infrastruktur SPBE yang saling terhubung dan terintegrasi.
4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung pelaksanaan SPBE.

#### **2.4.3 Manfaat Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)**

Dalam pelaksanaannya, penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) membawa sejumlah keuntungan, antara lain:

1. Menghemat anggaran melalui peningkatan efisiensi dalam pembangunan SPBE.
2. Mendukung implementasi Satu Data Indonesia dengan mendorong pertukaran data antar instansi pemerintah pusat maupun daerah.
3. Memacu penggunaan aplikasi umum secara bersama di lingkungan instansi pemerintah dan pemerintah daerah.
4. Memaksimalkan pemanfaatan infrastruktur TIK yang terintegrasi serta dapat digunakan bersama oleh berbagai instansi pemerintah.

## 5. Menjamin keamanan informasi milik pemerintah.

Secara keseluruhan, manfaat SPBE akan semakin terasa apabila penyelenggaraannya dijalankan secara optimal. Keuntungan-keuntungan ini diharapkan mampu mewujudkan sistem pemerintahan yang lebih terintegrasi, efisien, dan transparan sehingga masyarakat dapat merasakan secara langsung dampak positif dari penerapan SPBE.

### **2.5 Aplikasi Srikandi**

Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) adalah platform berbasis web untuk pengelolaan arsip dinamis secara elektronik yang dikembangkan sebagai bagian dari inisiatif digitalisasi pemerintahan. SRIKANDI diresmikan sebagai aplikasi umum bidang kearsipan dinamis melalui Keputusan Menteri PANRB No. 679 Tahun 2020, dan selaras dengan Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE. Sistem ini memungkinkan proses pengarsipan, disposisi surat, dan penandatanganan dokumen dilakukan dengan lebih efisien, terstandardisasi, dan terintegrasi antar instansi pemerintahan (Hakim dan Syahrudin. 2025).

Fungsi utama dari aplikasi SRIKANDI adalah menyediakan layanan pengelolaan arsip dinamis mulai dari penciptaan, penerimaan, pendistribusian, penggunaan, hingga penyusutan arsip secara elektronik. Sistem ini memungkinkan proses surat-menyurat, disposisi, serta penandatanganan dokumen dapat dilakukan secara digital dengan tanda tangan elektronik yang sah secara hukum. Hal ini membuat pengelolaan arsip menjadi lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Penelitian (Harahap dan Trimurni, 2025) menunjukkan bahwa SRIKANDI mempermudah dan mempercepat distribusi surat, penandatanganan elektronik, pelacakan dokumen, serta konektivitas antar instansi, sehingga mampu meningkatkan kinerja birokrasi di era digital.

Dalam konteks implementasi SPBE, SRIKANDI memiliki peran strategis. Pertama, aplikasi ini membantu mewujudkan efisiensi dan standarisasi

pengarsipan, sebab seluruh instansi diwajibkan menggunakan sistem yang sama.

Kedua, SRIKANDI mendukung transparansi dan akuntabilitas, karena setiap arsip tercatat secara digital dan mudah ditelusuri dalam proses audit maupun pengawasan publik. Ketiga, aplikasi ini memperkuat interoperabilitas data, sebab penggunaan aplikasi yang sama di tingkat nasional memungkinkan integrasi informasi kearsipan antar lembaga dan daerah. Dengan fungsi tersebut, SRIKANDI dipandang sebagai tulang punggung digitalisasi administrasi dalam kerangka SPBE (Muzaki, 2024). Meskipun memiliki manfaat besar, penerapan SRIKANDI di berbagai instansi tidak lepas dari hambatan dan tantangan.

Muzaki (2024) menemukan bahwa beberapa kendala yang sering muncul antara lain keterbatasan literasi digital aparatur, resistensi sebagian pegawai terhadap perubahan dari sistem manual ke digital, serta keterbatasan infrastruktur teknologi di beberapa daerah, terutama akses internet yang belum merata. Selain itu, kendala teknis berupa gangguan server pusat juga dilaporkan dapat menghambat kelancaran persuratan dan pengarsipan elektronik. Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah aspek keamanan informasi, mengingat arsip pemerintahan seringkali bersifat sensitif dan strategis. Oleh sebab itu, dukungan keamanan siber dan kesadaran akan pentingnya perlindungan data menjadi syarat utama keberhasilan aplikasi ini.

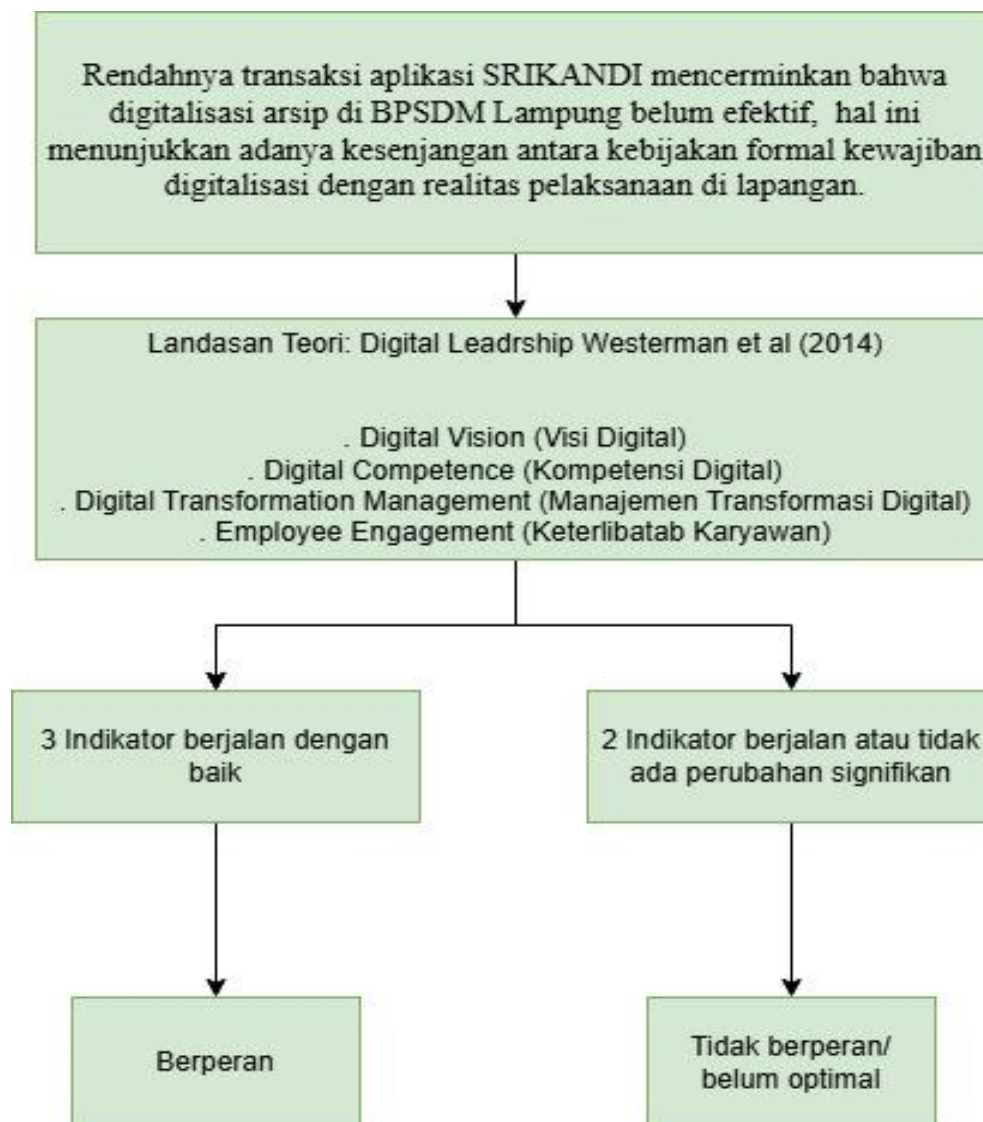
Dengan mempertimbangkan fungsi, manfaat, serta tantangan tersebut, dapat dipahami bahwa keberhasilan implementasi aplikasi SRIKANDI tidak hanya bergantung pada aspek teknis sistem, tetapi juga pada kepemimpinan digital yang visioner, komitmen organisasi, peningkatan kapasitas SDM, serta penyediaan infrastruktur yang memadai. Oleh karena itu, SRIKANDI bukan hanya alat bantu administratif, melainkan bagian integral dari agenda transformasi digital pemerintahan untuk mewujudkan tata kelola yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel.

## 2.6 Kerangka Berpikir

Kerangka Kerangka berpikir dalam penelitian ini disusun untuk menjelaskan bagaimana peran kepemimpinan digital dalam pemanfaatan aplikasi SRIKANDI di BPSDM Provinsi Lampung. Permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini adalah rendahnya transaksi aplikasi SRIKANDI yang menunjukkan bahwa digitalisasi arsip belum berjalan secara optimal, sehingga terdapat kesenjangan antara kebijakan formal digitalisasi dengan implementasi di lapangan. Penelitian ini menggunakan konsep digital leadership yang dikemukakan oleh George Westerman yang terdiri dari empat indikator, yaitu digital vision, digital competence, digital transformation management, dan employee engagement. Keempat indikator tersebut digunakan sebagai alat analisis untuk menilai sejauh mana kepemimpinan digital telah berperan dalam mendorong pemanfaatan aplikasi SRIKANDI.

Setiap indikator dianalisis berdasarkan kondisi nyata di lapangan untuk melihat apakah indikator tersebut telah berjalan dengan baik atau belum. Digital vision dinilai dari adanya arah kebijakan dan komitmen pimpinan dalam mendorong digitalisasi, digital competence dilihat dari kemampuan pegawai dalam mengoperasikan aplikasi, digital transformation management dinilai dari pengelolaan perubahan sistem kerja dari manual ke digital, serta employee engagement dilihat dari tingkat keterlibatan dan partisipasi pegawai dalam penggunaan aplikasi SRIKANDI. Hasil dari analisis keempat indikator tersebut kemudian digunakan untuk menentukan tingkat peran kepemimpinan digital. Kepemimpinan digital dikatakan berperan apabila sebagian besar indikator (minimal tiga indikator) berjalan dengan baik dan menunjukkan adanya perubahan nyata dalam pemanfaatan aplikasi SRIKANDI. Sebaliknya, kepemimpinan digital dikatakan tidak berperan atau belum optimal apabila hanya sebagian kecil indikator (dua indikator atau kurang) yang berjalan, atau tidak menunjukkan perubahan signifikan dalam praktik penggunaan aplikasi.

Dengan demikian, kerangka berpikir ini menegaskan bahwa penilaian terhadap peran kepemimpinan digital tidak hanya didasarkan pada keberadaan kebijakan, tetapi juga pada keterpenuhan indikator-indikator digital leadership secara menyeluruh. Oleh karena itu, semakin banyak indikator yang berjalan dengan baik, maka semakin besar peran kepemimpinan digital dalam mendorong pemanfaatan aplikasi SRIKANDI sebagai bagian dari implementasi SPBE di BPSDM Provinsi Lampung.



Gambar 1. Kerangka Berpikir  
*Dibuat oleh Penulis, 2025*

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2023) Metode penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang berlandaskan pada paradigma postpositivisme atau interpretatif. Metode ini digunakan untuk mengkaji objek dalam kondisi yang alami, di mana peneliti berperan langsung sebagai instrumen utama. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara triangulasi, yakni menggabungkan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang terkumpul umumnya bersifat kualitatif, kemudian dianalisis secara induktif. Hasil dari penelitian kualitatif tidak hanya ditujukan untuk memahami makna yang terkandung dalam suatu fenomena, tetapi juga untuk mengungkap keunikan, membangun konstruksi pemahaman atas fenomena tersebut, serta memungkinkan munculnya hipotesis baru.

Sedangkan menurut Creswell (2023) Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang berupaya menggali serta membangun makna suatu fenomena melalui perspektif para partisipan. Dalam prosesnya, peneliti mencoba menelusuri peristiwa atau pengalaman yang berkaitan dengan individu tertentu, kemudian mengumpulkan cerita-cerita mereka secara naratif untuk dipahami dan dianalisis. Dengan demikian, penelitian ini menekankan pada upaya memahami secara mendalam suatu fenomena melalui data kualitatif yang diperoleh langsung dari partisipan, sehingga mampu memberikan gambaran yang utuh dan bermakna.

#### **3.2 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Lampung. BPSDM merupakan perangkat daerah yang

memiliki tugas pokok dalam bidang pengembangan kompetensi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. Lembaga ini menjadi pusat pelatihan, pendidikan, dan pengembangan kapasitas pegawai, sekaligus berperan dalam mendukung terwujudnya birokrasi yang profesional, akuntabel, dan berdaya saing.

Pemilihan lokasi penelitian di BPSDMD Prvinsi Lampung didasarkan pada pertimbangan bahwa instansi ini telah ditunjuk sebagai salah satu unit kerja yang wajib menerapkan aplikasi SRIKANDI sebagai aplikasi umum bidang kearsipan dinamis terintegrasi sesuai regulasi nasional dan daerah. Pemilihan lokasi didasarkan pada fakta bahwa tingkat pemanfaatan aplikasi SRIKANDI di BPSDM masih relatif rendah dibanding target nasional, sehingga relevan untuk diteliti dari perspektif kepemimpinan digital.

Konteks penelitian di BPSDM juga penting karena lembaga ini menjadi representasi bagaimana digitalisasi administrasi, khususnya melalui aplikasi SRIKANDI, diimplementasikan di level daerah. Dengan demikian, penelitian di lokasi ini diharapkan mampu memberikan gambaran nyata mengenai peran digital leadership, kesiapan pegawai, serta dukungan infrastruktur dalam mendukung keberhasilan transformasi digital birokrasi di Provinsi Lampung.

### **3.3 Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini diarahkan pada upaya memahami secara mendalam bagaimana peran *digital leadership* berpengaruh terhadap pemanfaatan aplikasi SRIKANDI di lingkungan BPSDM Provinsi Lampung. Penelitian ini tidak hanya menekankan pada aspek teknis penggunaan aplikasi, tetapi juga pada bagaimana kepemimpinan mampu mendorong perubahan perilaku, kesiapan digital pegawai, serta dukungan organisasi terhadap transformasi digital. Dengan demikian, penelitian ini berusaha melihat keterkaitan antara kepemimpinan, kesiapan sumber daya manusia, dan keberhasilan implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Menurut Westerman et al (2014) dalam (Syahfitri et al 2025), *digital leadership* didefinisikan sebagai kemampuan pemimpin untuk memimpin organisasi dalam memanfaatkan teknologi digital secara maksimal, dengan menggabungkan visi strategis, pengelolaan perubahan, dan inovasi berbasis teknologi. Berdasarkan kerangka teori tersebut, penelitian ini memfokuskan perhatian pada empat variabel utama:

1. *Digital Vision* (Visi Digital), *digital vision* adalah kemampuan pemimpin untuk melihat ke depan, berinovasi, dan menghadapi ketidakpastian dalam lanskap digital, serta mengidentifikasi kapan perubahan digital diperlukan untuk memasukkannya ke dalam agenda organisasi.
  - a. Pemimpin memiliki visi digital yang jelas.
  - b. Pemimpin mampu mengenali peluang dan tantangan dalam era transformasi digital.
2. *Digital Competence* (Kompetensi Digital), mengindikasikan bahwa kompetensi digital mencakup kemampuan dan keahlian yang dibutuhkan untuk beroperasi dan berhasil dalam lingkungan digital.
  - a. Pemimpin menguasai teknologi digital.
  - b. Pemimpin mampu mengintegrasikan teknologi ke dalam proses kerja organisasi secara efektif.
3. *Digital Transformation Management* (Manajemen Transformasi Digital), adalah proses integrasi teknologi digital ke dalam semua aspek bisnis, mengubah cara organisasi memberikan nilai kepada pelanggan dan memandu perusahaan melalui perubahan digital dengan menekankan pentingnya kepemimpinan dan pemanfaatan teknologi untuk inovasi dan peningkatan kinerja bisnis.
  - a. Pemimpin mampu mengelola perubahan organisasi menuju sistem *digital* secara terencana dan efisien.
  - b. Pemimpin mampu menyelaraskan model bisnis organisasi agar selaras dengan praktik dan teknologi digital baru.

4. *Employee Engagement* (Keterlibatan Karyawan), merujuk pada keterikatan (*engagement*) karyawan terhadap pekerjaan dan perusahaan, yang ditandai dengan motivasi tinggi, loyalitas, dan kemauan untuk memberikan kontribusi melebihi tanggung jawab tugas pokoknya..
  - a. Pemimpin mendorong partisipasi aktif pegawai dalam penggunaan teknologi digital.
  - b. Pemimpin membangun budaya kerja yang kolaboratif & mendukung penggunaan digital secara bersama-sama

Dengan memfokuskan penelitian pada keempat dimensi tersebut, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai sejauh mana digital leadership berperan dalam mendorong pemanfaatan aplikasi SRIKANDI serta faktor pendukung maupun penghambat yang muncul dalam implementasinya di BPSDM Provinsi Lampung.

### **3.4 Sumber Data**

Data sekunder merupakan data informasi yang dikumpulkan peneliti melalui perantara atau pihak lain, bukan diperoleh secara langsung dari objek atau subjek penelitian. Dalam penelitian kualitatif, keberadaan sumber data memegang peranan penting karena berpengaruh terhadap validitas serta kelengkapan informasi yang didapatkan peneliti. Menurut Sugiyono (2023), sumber data dibedakan menjadi dua kategori, yaitu primer dan sekunder. Data primer merupakan informasi yang diperoleh langsung dari subjek penelitian melalui wawancara, observasi, atau interaksi dengan informan. Sedangkan data sekunder merupakan informasi yang dikumpulkan secara tidak langsung dari dokumen, arsip, laporan, atau penelitian sebelumnya.

1. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh dari observasi, interaksi langsung dengan informan dan wawancara mendalam dengan pejabat struktural, serta aparatur sipil negara (ASN) BPSDM Provinsi Lampung yang menggunakan aplikasi SRIKANDI dalam aktivitas administrasi sehari-hari.

2. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, seperti Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE, PermenPANRB Nomor 679 Tahun 2020, laporan internal BPSDM Provinsi Lampung , serta literatur berupa buku dan jurnal yang relevan dengan tema digital leadership, *e-government*, dan aplikasi SRIKANDI.

### 3.5 Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, informan dipilih dengan teknik *purposive sampling*, yaitu penentuan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Menurut Sugiyono (2023), *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan peneliti, atau memiliki kewenangan serta pengalaman yang relevan terhadap fenomena yang diteliti. Teknik ini dipilih karena tidak semua individu di BPSDM memiliki keterlibatan langsung dengan penerapan aplikasi SRIKANDI, sehingga peneliti hanya mengambil informan yang dinilai paling relevan dan kompeten memberikan data.

Tabel 3. Informan Penelitian

No.	Jenis / Kriteria Informan	Alasan
1.	Kepala BPSDM Provinsi Lampung .	Sebagai pengambil kebijakan tertinggi, Kepala BPSDM memiliki pandangan strategis terkait arah kebijakan digitalisasi di lingkungan BPSDM, termasuk penerapan aplikasi SRIKANDI. Informasi dari Kepala BPSDM sangat penting untuk memahami bagaimana visi kepemimpinan digital diterapkan di tingkat institusi.

No.	Jenis / Kriteria Informan	Alasan
2.	Sekretaris BPSDM Provinsi Lampung	Sekretaris memiliki fungsi koordinatif lintas bidang di BPSDM, sehingga dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai konsistensi kebijakan, kendala koordinasi, serta faktor pendukung penerapan aplikasi digital di lingkungan kerja.
3.	Kepala Sub Bagian (Kasubag) Umum	Bagian umum memiliki peran penting dalam tata kelola administrasi, seperti absensi, surat-menyurat, dan pengarsipan. Kasubag Umum menjadi kunci dalam melihat implementasi teknis aplikasi SRIKANDI dan hambatan administratif yang dihadapi.
4.	Pegawai pelaksana (ASN) 5 staf dari 5 bidang	sebagai pengguna langsung aplikasi SRIKANDI, pegawai pelaksana dapat memberikan informasi faktual mengenai pengalaman sehari-hari, kemudahan maupun kesulitan yang dihadapi, serta persepsi mereka mengenai efektivitas aplikasi terhadap kedisiplinan dan produktivitas kerja.

---

*Sumber : Dibuat oleh penulis, 2025*

### **3.6 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah penting dalam penelitian untuk memperoleh informasi yang valid dan mendalam. Menurut Sugiyono (2023), pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dilakukan di setting alamiah dengan peneliti sebagai instrumen utama, menggunakan wawancara, observasi, dan

dokumentasi. Sementara itu, Creswell (2023) menegaskan bahwa pengumpulan data kualitatif mencakup wawancara, observasi lapangan, analisis dokumen, serta penggunaan berbagai media pendukung agar informasi yang diperoleh lebih kaya dan komprehensif.

#### 1. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan pendekatan semi-terstruktur, yaitu menggunakan pedoman pertanyaan tetapi tetap memberi ruang fleksibilitas bagi informan untuk menyampaikan pandangannya. Teknik ini dipilih agar peneliti dapat menggali informasi secara detail terkait peran digital leadership, pemanfaatan aplikasi SRIKANDI, serta hambatan dan solusi dalam penerapannya di BPSDM Provinsi Lampung. Informan yang diwawancarai meliputi Kepala BPSDM, pejabat struktural, sekretaris, kasubag umum, dan ASN pelaksana. Hasil wawancara akan memberikan gambaran yang kaya mengenai perbedaan pandangan antara pengambil kebijakan dan pelaksana di lapangan.

#### 2. Observasi

Observasi dilakukan secara langsung terhadap pelaksanaan penggunaan aplikasi SRIKANDI dalam aktivitas administrasi di BPSDM. Observasi ini bertujuan untuk melihat secara nyata bagaimana aplikasi digunakan, bagaimana respon pegawai terhadap sistem digital, serta kendala teknis yang muncul. Observasi juga penting untuk memvalidasi data wawancara sehingga tidak hanya berdasarkan persepsi informan tetapi juga fakta empiris yang terlihat di lapangan.

#### 3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder berupa regulasi, laporan internal, pedoman kerja, serta arsip yang diolah melalui aplikasi SRIKANDI. Dokumen-dokumen tersebut meliputi Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE, PermenPANRB Nomor 679 Tahun 2020, serta laporan internal BPSDM. Analisis dokumen ini memberikan dasar normatif sekaligus mendukung data primer yang diperoleh dari wawancara dan observasi.

#### 4. Trigulasi

Triangulasi dilakukan dengan cara membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Misalnya, informasi dari wawancara pejabat struktural tentang tingkat pemanfaatan aplikasi akan dibandingkan dengan hasil observasi penggunaan aplikasi oleh pegawai, serta diverifikasi dengan dokumen laporan internal. Dengan teknik ini, data yang diperoleh lebih terjamin keabsahannya karena diperoleh dari berbagai sudut pandang dan sumber yang berbeda.

### 3.7 Teknik Pengolahan Data

Setelah mendapatkan data, tahap selanjutnya peneliti melakukan pengolahan data, menurut Sugiono (2023) pengolahan data dalam penelitian kualitatif mencakup dua aspek penting, yaitu editing data dan interpretasi data.

#### 1. Editing Data

Editing data kualitatif dilakukan untuk memastikan jawaban responden telah lengkap, jelas, dan konsisten. Jika ditemukan data yang kurang jelas atau tidak selaras, maka peneliti perlu melakukan klarifikasi kembali kepada sumber data. Setelah itu, seluruh data disusun secara teratur sehingga memudahkan proses analisis (Sugiono, 2023)

##### a. Memeriksa Kelengkapan Data

Pada tahap ini peneliti memastikan bahwa semua data dari lapangan sudah tercatat dengan baik. Catatan wawancara, hasil observasi, maupun dokumen yang diperoleh diperiksa agar tidak ada bagian yang hilang atau belum tercatat.

##### b. Memeriksa Kejelasan Data

Data kualitatif sering kali berupa narasi panjang. Karena itu, peneliti perlu memeriksa apakah data yang ditulis jelas, mudah dipahami, dan tidak menimbulkan multi-tafsir. Bila ada yang kurang jelas, peneliti bisa melakukan cross-check ulang dengan informan.

##### c. Memeriksa Konsistensi Data

Melihat apakah data yang diperoleh dari berbagai sumber memiliki konsistensi atau justru terdapat perbedaan yang signifikan.

d. Memeriksa Kecocokan Data

Peneliti perlu mengoreksi kesalahan teknis seperti salah ketik, penggunaan istilah yang rancu, atau penulisan nama dan istilah khusus yang tidak tepat. Hal ini penting karena detail kecil dapat mengubah makna data.

e. Melakukan Klasifikasi Bila Diperlukan

Jika pada saat editing ditemukan data yang kurang lengkap atau meragukan, peneliti bisa melakukan klarifikasi dengan informan melalui wawancara tambahan (*follow-up interview*).

2. Interpretasi Data

Interpretasi data adalah proses penafsiran terhadap data yang telah diedit agar memiliki makna yang lebih mendalam. Data yang sudah dipilah dan diperiksa kemudian dihubungkan dengan teori yang digunakan, seperti konsep digital leadership (Westerman et al., 2014), e-government, SPBE, dan penerapan aplikasi SRIKANDI. Melalui interpretasi, peneliti tidak hanya menyajikan data dalam bentuk deskriptif, tetapi juga memberikan analisis mengenai bagaimana kepemimpinan digital berperan dalam mendorong pemanfaatan aplikasi SRIKANDI serta dampaknya terhadap kedisiplinan ASN.

### 3.8 Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2023), analisis data kualitatif dilakukan sejak data mulai dikumpulkan hingga penelitian selesai, dengan tujuan menyusun data yang semula berserakan menjadi pola, hubungan, dan makna yang lebih utuh. Analisis data dalam penelitian kualitatif bersifat interaktif dan berlangsung terus-menerus sampai data mencapai titik jenuh. Creswell menambahkan bahwa analisis data kualitatif meliputi proses mengorganisasi data, membaca keseluruhan informasi, melakukan pengkodean, mengidentifikasi tema, menyajikan data dalam narasi,

serta menginterpretasikan makna data berdasarkan teori maupun konteks penelitian (Creswell 2023).

Menurut Miles dan Huberman (2014), yang juga sejalan dengan praktik penelitian terkini, analisis data kualitatif dilakukan melalui tiga tahap utama yang saling berhubungan dan berlangsung secara bersamaan. Tahapan tersebut meliputi reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (*drawing & verifying conclusions*). Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini menggunakan model analisis interaktif dari Miles dan Huberman yang terdiri atas tiga komponen utama, yaitu:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah proses memilih, menyederhanakan, dan memfokuskan data yang relevan dengan fokus penelitian. Dalam konteks ini, data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi diklasifikasikan ke dalam kategori seperti digital leadership, pemanfaatan aplikasi SRIKANDI, kesiapan digital pegawai, serta hambatan implementasi.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Data yang sudah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, matriks, tabel, atau bagan. Penyajian data bertujuan untuk memudahkan peneliti melihat hubungan antar data, menemukan pola, serta memahami fenomena secara lebih utuh.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Pada tahap ini, peneliti menarik makna dari data yang sudah disajikan dan kemudian memverifikasi kesimpulan tersebut dengan cara membandingkan dengan teori, data tambahan, serta hasil triangulasi. Kesimpulan bersifat sementara selama proses penelitian berlangsung, tetapi akan menguat setelah data yang diperoleh konsisten.

### **3.9 Teknik Validasi Data**

Menurut Sugiyono (2023), keabsahan data kualitatif dapat diuji melalui beberapa teknik, seperti kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas.

Dari keempatnya, uji kredibilitas biasanya menjadi fokus utama, yang dilakukan dengan cara memperpanjang pengamatan, meningkatkan ketekunan, serta menggunakan teknik triangulasi.

Creswell (2023) menyebutkan bahwa validasi data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan berbagai strategi, antara lain triangulasi sumber data, pengecekan anggota (*member checking*), penyajian deskriptif yang kaya (*thick description*), serta audit trail. Strategi ini digunakan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan benar-benar mewakili fenomena yang diteliti, sehingga hasil penelitian dapat dipercaya.

## 1. Uji Kredibilitas

### a. Perpanjangan Pengamatan

Peneliti melakukan perpanjangan pengamatan di BPSDM Provinsi Lampung dengan terus kembali ke lokasi penelitian hingga data yang diperoleh mencapai titik jenuh. Hal ini memungkinkan peneliti melakukan pengecekan ulang terhadap data mengenai peran digital leadership dalam pemanfaatan aplikasi SRIKANDI dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen pendukung.

### b. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan dilakukan dengan cara mengamati secara mendalam proses penggunaan aplikasi SRIKANDI dalam administrasi pemerintahan, termasuk bagaimana pimpinan, pejabat struktural, dan ASN pelaksana terlibat. Peneliti juga memperkuat ketekunan dengan mempelajari literatur yang relevan, seperti teori digital leadership, e-government, dan kebijakan SPBE.

### c. Triangulasi

Triangulasi digunakan untuk menguji konsistensi data melalui berbagai pendekatan. Dalam penelitian ini, triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara mendalam, catatan observasi, dan dokumen resmi seperti laporan implementasi aplikasi SRIKANDI. Triangulasi sumber dilakukan dengan memeriksa perbedaan informasi

dari Kepala BPSDM, pejabat bidang, sekretaris, kasubag umum, dan ASN pelaksana. Menurut Sugiyono (2023), triangulasi memungkinkan peneliti mendapatkan pandangan yang lebih utuh terhadap fenomena penelitian.

d. Member Checking

Member checking dilakukan dengan cara mengonfirmasi hasil interpretasi data kepada para informan. Misalnya, setelah menyusun kesimpulan sementara tentang peran digital leadership dalam mendorong penggunaan SRIKANDI, peneliti mengembalikan temuan tersebut kepada informan untuk memastikan kesesuaian makna dengan pengalaman nyata mereka.

## **2. Uji Transferabilitas**

Transferabilitas dijaga dengan menyajikan deskripsi yang kaya dan rinci (thick description) mengenai konteks penelitian, mulai dari profil BPSDM Provinsi Lampung, pelaksanaan kebijakan SPBE, hingga pemanfaatan aplikasi SRIKANDI dalam administrasi sehari-hari. Dengan deskripsi ini, pembaca atau peneliti lain dapat menilai sejauh mana temuan penelitian ini relevan dan dapat diterapkan di instansi pemerintah lain.

## **3. Uji Dependabilitas**

Dependabilitas dilakukan dengan memastikan bahwa seluruh proses penelitian berjalan secara konsisten sesuai kaidah ilmiah. Peneliti membuat catatan lengkap mengenai setiap tahapan, mulai dari perencanaan, pengumpulan data, pengolahan, hingga analisis. Catatan ini berfungsi sebagai audit trail yang dapat ditelusuri ulang oleh peneliti lain untuk memverifikasi konsistensi hasil penelitian.

## **4. Uji Konfirmabilitas**

Konfirmabilitas dilakukan untuk memastikan bahwa hasil penelitian benar-benar bersumber dari data lapangan. Hal ini diperkuat dengan menyajikan wawancara langsung dari ASN, catatan observasi penggunaan SRIKANDI, serta dokumen kebijakan SPBE. Selain itu, interpretasi peneliti selalu

dikaitkan dengan teori digital leadership (Westerman et al., 2014).

Dengan menerapkan keempat uji keabsahan data tersebut, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan temuan yang kredibel, valid, dan mampu memberikan gambaran akurat mengenai peran digital leadership dalam pemanfaatan aplikasi SRIKANDI di BPSDM Provinsi Lampung.

## V. PENUTUP

### 5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan digital dalam pemanfaatan aplikasi SRIKANDI di BPSDM Provinsi Lampung telah berperan, namun belum optimal. Peran tersebut terlihat dari adanya upaya pimpinan dalam mendorong implementasi sistem digital melalui kebijakan, arahan organisasi, serta pengelolaan perubahan menuju sistem berbasis aplikasi. Namun, peran tersebut belum sepenuhnya berhasil karena dari empat indikator digital leadership, hanya dua indikator yang terlaksana, sedangkan dua indikator lainnya belum berjalan secara optimal.

Indikator yang telah berjalan adalah digital vision, yang ditunjukkan melalui integrasi agenda digitalisasi ke dalam Renstra serta dukungan kebijakan terhadap penerapan SRIKANDI, dan digital transformation management, yang tercermin dari pengaturan sistem kerja melalui penunjukan pengelola aplikasi, serta pelaksanaan pendampingan teknis. Sementara itu, indikator digital competence belum berjalan optimal karena keterbatasan kemampuan teknis pegawai, dan employee engagement juga belum optimal yang terlihat dari rendahnya keterlibatan serta partisipasi aktif pegawai dalam penggunaan aplikasi. Dengan demikian, kepemimpinan digital dapat dikatakan sudah berperan dalam mendorong pemanfaatan SRIKANDI, namun belum optimal karena belum didukung oleh kompetensi digital dan keterlibatan pegawai secara menyeluruh, sehingga implementasi sistem masih belum maksimal dan cenderung didominasi oleh proses manual.

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, dapat ditegaskan bahwa kepemimpinan digital di BPSDM Provinsi Lampung melalui pemanfaatan aplikasi SRIKANDI telah menunjukkan adanya implementasi e-government dalam praktik administrasi pemerintahan. Hal ini terlihat dari mulai terjadinya perubahan sistem kerja dari mekanisme manual menuju sistem administrasi berbasis elektronik, terbentuknya rekam jejak digital dalam setiap proses administrasi, serta adanya penguatan aspek akuntabilitas melalui bukti elektronik yang terdokumentasi. Perubahan tersebut juga didukung oleh kebijakan formal pimpinan yang mengatur penggunaan aplikasi SRIKANDI sebagai mekanisme resmi dalam pengelolaan persuratan, sehingga mendorong terciptanya tata kelola administrasi yang lebih tertib dan terstruktur. Meskipun demikian, efisiensi yang dihasilkan belum sepenuhnya optimal karena sistem manual masih digunakan secara bersamaan, sehingga implementasi e-government masih berada pada tahap transisi menuju kondisi yang lebih optimal. Dengan demikian, kepemimpinan digital dalam pemanfaatan aplikasi SRIKANDI tidak hanya berfungsi sebagai arah kebijakan, tetapi juga telah menunjukkan peran nyata dalam mendorong transformasi sistem administrasi pemerintahan berbasis digital.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kepemimpinan digital dalam pemanfaatan aplikasi SRIKANDI di BPSDM Provinsi Lampung sudah berperan namun belum optimal, maka disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Peningkatan Digital Competence (Kompetensi Digital) Disarankan kepada pimpinan BPSDM Provinsi Lampung untuk meningkatkan kompetensi digital pegawai melalui pelatihan teknis penggunaan aplikasi SRIKANDI secara berkala dan merata. Selain itu, perlu dilakukan pendampingan intensif serta penyusunan panduan penggunaan aplikasi yang sistematis agar pegawai mampu mengoperasikan sistem secara mandiri.
2. Peningkatan Employee Engagement (Keterlibatan Pegawai) Disarankan agar pimpinan meningkatkan keterlibatan pegawai melalui penguatan kedisiplinan dan konsistensi penggunaan aplikasi SRIKANDI dalam aktivitas persuratan. Hal ini dapat dilakukan melalui pengawasan berkala, pemberian motivasi, serta

penerapan aturan yang mewajibkan penggunaan aplikasi dalam setiap proses administrasi.

3. Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Aplikasi SRIKANDI, agar perubahan digital tidak terus berada pada tahap transisi, BPSDM Provinsi Lampung disarankan untuk menyusun dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus penggunaan aplikasi SRIKANDI. SOP ini diharapkan dapat menjadi pedoman yang jelas dan seragam bagi seluruh unit kerja, sekaligus mengurangi ketergantungan pada sistem manual dan meningkatkan konsistensi penerapan administrasi digital.
4. Penguatan Manajemen Perubahan dalam Transformasi Digital, pimpinan perlu memperkuat manajemen perubahan dengan strategi yang lebih terstruktur, seperti penetapan tahapan transformasi digital, pengawasan implementasi, serta evaluasi berkala terhadap pemanfaatan aplikasi SRIKANDI. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa perubahan dari sistem manual ke digital berjalan secara bertahap, terarah, dan berkelanjutan.
5. Peningkatan Keterlibatan Pegawai dalam Budaya Kerja Digital, untuk mendorong keterlibatan pegawai secara lebih aktif, pimpinan disarankan untuk memberikan ruang partisipasi yang lebih luas dalam penggunaan aplikasi SRIKANDI serta mendorong kemandirian pegawai dalam proses administrasi digital. Pemberian kejelasan peran, kepercayaan, dan dukungan teknis diharapkan dapat mempercepat terbentuknya budaya kerja digital yang kolaboratif dan adaptif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adra, A., & Permana, I. (2023). Pemanfaatan Aplikasi Srikandi Bagi Pegawai Di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bukittinggi. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN)*, 11(01), 1–12.
- Ainaya Nazilatul Fathinia Muqoffa, Mawar, M., & Novinda Serikandi. (2022). Manfaat Sosial Media Dalam E-Government Di Indonesia. *JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora*, 1(3), 42–49. <https://doi.org/10.56910/jispendiora.v1i3.241>
- Akmal Muzakki, L. R. R. (2024). Program Studi S1 Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.
- Alamanda, A. (2024). SRIKANDI dan Perannya Dalam Kearsipan Dinamis. <https://sumsel.kemenag.go.id/opini/view/3111/srikandi-dan-perannyadalamkearsipan-dinamis>.
- Andrio Karatem, D. M., Engko, C., Grace Loupatty, L., & Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pattimura Ambon, F. (2024). Pengaruh Penerapan E-Government Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru. *Intelektiva*, 6(3), 31–42.
- Avolio, B. J., Kahai, S., & Dodge, G. E. (2000). E-leadership: Implications for theory, research, and practice. *The Leadership Quarterly*, 11(4), 615–668.
- Bass, B. M., & Avolio, B. J. (1994). Improving organizational effectiveness through transformational leadership. *Sage Publications*
- Cahyarini, Farida Dwi. (2021a). Implementasi Digital Leadership dalam Pengembangan Kompetensi Digital pada Pelayanan Publik. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 25(1), 47–60.
- Devina, A. S., Safii, M., Prasetyawan, A., & Ghazali, A. M. (2024). Evaluasi Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu. *BIBLIOTIKA: Jurnal Kajian Perpustakaan dan Informasi*, 8(1), 220–237.

- Dao, Y. (2024). Kepemimpinan Strategis Di Era Vuca ( Volatility , Uncertainty , Complexity And Kepemimpinan Strategis Di Era Vuca ( Volatility , Uncertainty , Complexity And Ambiguity ). March.
- Ditjen, A. (2023). Aplikasi SRIKANDI. <https://aptika.kominfo.go.id/informasi/layanan/srikandi/>
- Fauzi, E. A., & Purnamawati, N. (2025). Definisi Konseptual E-Government dan E-Governance : *Analisis Komparatif*. 12(1), 16–22.
- Hakim, A. R., & Syahrudin. (2025). Efektivitas Pengelolaan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI). *Jurnal Mahasiswa Pemerintah*, 2(2), 216–223.
- Harahap, M. D., Trimurni, F., Publik, I. A., Ilmu, F., Politik, I., & Utara, U. S. (2025). Kualitas Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi ( Srikandi ) dalam Pelayanan Administrasi di Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Deli Serdang ., 5(1), 295–312.
- Hesti Meliasari, Isa Dwiyono, Purwadhi, Y. R. W. (2024). Digital Leadership Skill Dan Perananya Bagi Kepemimpinan Institusi Pelayanan Kesehatan Di Era Digital. 6(09).
- Jurnal, M., Syafitri, N., Sari, D. P., Sina, U. I., Kota, L. B., Baja, K. L., Batam, K., & Riau, K. (2025). Kepemimpinan Digital sebagai Kunci Adaptasi Karyawan di Tengah Transformasi Teknologi. 4(2), 168–181. <https://doi.org/10.54259/manabis.v4i2.4842>
- Karno, K. (2025). Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi ( Srikandi ) di Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. April.
- Khaira, N., & Airlangga, U. (2024). *Peran Literasi Digital dan Kepemimpinan Digital terhadap Kinerja Karyawan : Studi Kasus Generasi Millennial dan Z di GoTo Group*. 07(2022), 135–147.
- Lamirin, Santoso, J., & Selwen, P. (2023). Penerapan Strategi Kepemimpinan Transformasional Dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi Pendidikan. *Jurnal Ilmiah Kanderang Tingang*, 14(2), 400–409.
- Lestari, P. A., Tasyah, A., Syofira, A., Rahmayani, C. A., Cahyani, R. D., Tresiana, N., & Lampung, U.(2021). INOVASI PELAYANAN PUBLIK BERBASIS DIGITAL (E-GOVNMENT) DI ERA PANDEMI COVID-19 (Digital-Based Public Service Innovation (E-Government) in the Covid-19 Pandemic Era). *Jurnal Ilmu Administrasi*. 18(2), 212-224. DOI:
- Lenak, S. M. C. (2021). *Jurnal governance*. 1(1), 1–9.

- Maryati, S., & Siregar, M. I. (2022). Kepemimpinan Digital dalam meningkatkan kinerja organisasi peran Teknologi Informasi dan Komunikasi. *Owner*, 6(4), 3616–3624.
- Munian, S., & Hasan, S. (2020). Hubungan Antara Kepimpinan Transformasi Guru Besar dengan Komitmen Kerja dalam kalangan Guru Sekolah Rendah di Daerah Kulim Bandar Baharu, Kedah. *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH)*, 5(6), 136–150.
- Novita, S. (2022). Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah Dan Kompetensi Terhadap Kinerja Pegawai Melalui Motivasi Kerja Sebagai Variabel Intervening. *Upi Yptk Journal Of Business And Economics*, 7(2), 156–161.
- Pemerintah Provinsi Lampung. (2024). SRIKANDI, SIKN-JIKN. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung.
- Pemerintah Provinsi Lampung. (2025). Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penerapan Aplikasi SRIKANDI Versi 3. Pemerintah Provinsi Lampung.
- Pratiwi, M. C., & Riyana, C. (2023). Educator as the key for digital transformation in curriculum and learning. *DWIJA CENDEKIA: Jurnal Riset Pedagogik*, 7(1), 118–124.
- Rahmaini, P. (2021). Penerapan Prinsip E-Government sebagai Wujud Inovasi Pelayanan Publik di Era Modern Tahun 2021. *KomunikasiMu Journal of Social Science and Humanities Studies*, 1(1), 46–51.
- Rifdan, Haerul Sakawati, M. N. Y. (2024). Analisis penerapan e-government dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di kecamatan tallo kota makassar. 4, 49–61.
- Sagita, I. (2022). Pemerintahan Berbasis Elektronik ( Studi Pada Program E-Sakip Desa Di Kabupaten Sumedang Tahun 2020). 2(April), 1–12.
- Samuel, L., & Ramli, A. H. (2025). Pengaruh Kepemimpinan Digital Dan Pemberdayaan Karyawan Terhadap Kinerja Karyawan Dimediasi Oleh Komitmen Organisasi Pada Industri Manufaktur. *Journal Of Economics And Business UBS*, 13(1), 282–295.
- Sarifuddin, Rikardo, D., & Safii, I. (2022). Pengaruh Kepemimpinan Transformasional, Budaya Organisasi, Dan Motivasi Terhadap Kinerja Tenaga Pendidik Dan Kependidikan Di Politeknik Pelayaran Banten. *Journal Marine Inside*, 1(2), 33–45. <https://doi.org/10.56943/Ejmi.V1i2.10>

- Setiadi, A. (2024). Analisis Digital Leadership Dan Transformasi Digital Dalam Peningkatan Pelayanan Publik. 6(12).
- Setyawati, R., Milaningrum, E., & Simatupang, L. (2024). Peran Moderasi Gender dalam pengaruh Attitude , Norm Subjective dan Perceived Behavior terhadap Food Intention : Uji Empiris terhadap Konsumsi Makanan Tradisional. 8(1), 51–61.
- Sipil, T., Bhayangkara, U., & Kunci, K. (2024). p-ISSN: 2774-6291 e-ISSN: 2774-6534 Available online at <http://cerdika.publikasiindonesia.id/index.php/cerdika/index>. 4(5), 396–401.
- Susarianto, B. (n.d.). Analisis Peran Kepemimpinan Digital Dalam Transformasi Digital Di Sektor Publik. 1530–1537.
- Tulungen, E. E., Saerang, D. P., & Maramis, J. B. (2022). Transformasi Digital : Peran Kepemimpinan Digital. *Jurnal Emba Jurnal Riset Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi*,
- Westerman, G., Bonnet, D., & McAfee, A. (2014). *Memimpin dunia digital: Mengubah teknologi menjadi transformasi bisnis*. Harvard Business Review Press s.
- Wujarso, R., Pitoyo, B. S., & Prakoso, R. (2023). Peran Kepemimpinan Digital Dalam Era Digital. *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research*, 7(1), 1–9.
- Yulistia, & Yanti, N. (2023). Factors Affecting Employee Performance Through Job Satisfaction As Intervening Variables Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan Melalui Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening Hubungan Antar Variabel. *Journal Of Social And Economics Research*, 5(1).
- Zuhruf, A. (2024). Transformational Leadership : Peran Pimpinan Dalam Transformasi Tata Kelola Kearsipan di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara.